

MEDIA KALTIMTARA

JUMAT,
8 SEPTEMBER
2023

.COM

PASANG IKLAN
HUBUNGI:
0853 8684 3137

TERDEPAN DALAM BERITA

MARAK TEROR BAKAR RUMAH DI TARAKAN

BACA HALAMAN 2-5



GUBERNUR PAPARKAN BEBERAPA ISU PENTING DI FORUM ASEAN BAC

BACA HALAMAN 12



Teror Bakar Rumah Kembali Terjadi di Tarakan

Satu Kios Hampir Terbakar

TARAKAN - Teror bakar rumah kembali meresahkan warga Tarakan, setelah sebelumnya terjadi aksi percobaan pembakaran rumah di RT 20 Kelurahan Selumit Pantai. Kali ini, sasarannya adalah salah satu kios di RT 8 Kelurahan Selumit Pantai, wilayah Pasar Beringin, sekira pukul 22.00 WITA, Rabu (6/9/2023).

Hal itu diberitakan oleh Ita, selaku ketua RT 8. Dijelaskannya, ia pertama kali mendapat kabar dari salah satu warga setempat bahwa ada api mun-

cul membakar kios yang berjualan pakan ayam. Kemudian ia langsung mendatangi lokasi dan melapor kepada polisi.

“Tiba di TKP malam tadi mengecek dan tidak menemukan ada bau minyak tanah ataupun bensin. Tidak ada bau minyak tanah dan yang melihat itu Pak Hendra dan satu lagi warga kami, dan mereka cepat bantu padamkan kebakaran,” ucapnya.

Kata Ita, pada waktu itu warga tidak menemukan orang mencurigakan.

Namun dari informasi yang diterima warganya, pelaku tidak menggunakan minyak tanah untuk membakar namun memakai plastik ataupun kayu jabuk.

Ia menerangkan, lokasinya kios yang dibakar ini berdempetan dengan bangunan bekas kebakaran beberapa waktu lalu. Menurutnya, jika tidak ada yang melihat api, bisa saja terjadi kebakaran yang lebih besar karena disebelahnya adalah bangunan lama.



ADE/MKR

Ita, ketua RT 8 saat menceritakan kronologis kejadian.

“Apinya sudah nyala besar, sepinggang banyak yang lihat, yang lihat pertama Pak Sangkal warga saya kebetulan lewat dan Hendra yang langsung bantu padamkan,” katanya.

Adapun jumlah KK yang bermukim di RTnya sebanyak 150-an KK dan jumlah bangunan cukup banyak bisa mencapai 200-an termasuk dari arah depan. “Dan dari 200-an itu ada kios, kebanyakan penyewa mereka tidak tidur di sini cuma usaha dari sini sampai ujung. Kalau di depan sana baru menginap. Karena rumah sendiri. Kalau kios ini jejeran ini pemiliknya Pak Tamrin,” tuturnya.

Ia melanjutkan, kejadian ini bukan pertama kali terjadi di wilayah RT 8. Kata Ita, ini merupakan yang kelima di wilayah pesisir Selumit Pantai. Pihaknya pun menginstruksikan warga bergantian melakukan ronda.

“Mulai malam langsung ronda terjadwal Sebelumnya belum ada ronda. Kami sudah diimbau cuma di sini isti-

lahnya warga belum ada komplain,” paparnya.

Pihaknya pun sudah membuat laporan ke kelurahan dan sudah turun ke lokasi. “Kejadian kan sekitar jam sepuluh malam langsung telpon polisi,” tambahnya.

Sebelum kejadian ini, kata Ita, sebenarnya warga telah melakukan kegiatan ronda. Namun karena kejadian ini, ronda akan lebih dimasifkan. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya

Editor: Andhika





Kapolres Tarakan, AKBP Ronaldo Maradona.

ADE/MKR

Marak Teror Bakar Rumah di Tarakan, Ini Penjelasan AKBP Ronaldo Maradona

TARAKAN – Belakangan ini, Masyarakat Kota Tarakan diresahkan dengan maraknya teror bakar rumah yang dilakukan seseorang tak dikenal. Umumnya, teror bakar rumah ini dilakukan di wilayah padat penduduk, seperti yang terjadi di RT 8 dan 20, Kelurahan Selumit Pantai, Kota Tarakan.

Kabar ini pun sudah terdengar oleh Kapolres Tarakan, AKBP Ronaldo Maradona. Dia mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti insiden teror percobaan pembakaran rumah tersebut.

Dikatakannya, pihaknya sudah proaktif melakukan penyelidikan meskipun sampai saat ini belum ada satu pun dari warga yang datang membuat pelaporan secara resmi.

Ronaldo mengaku sudah menginstruksikan personel untuk memonitor termasuk informasi dari media sosial. "Anggota kami sudah melakukan penyelidikan ke lapangan dan hasilnya sama, informasinya dari rekan di lapangan bahwa kejadian-

ya digambarkan masih berdasarkan cerita secara verbal atau lisan masyarakat," katanya.

Ronaldomelanjutkan, diamengimbau masyarakat untuk tetap waspada, jika melihat hal mencurigakan segera membuat laporan kepada pihak kepolisian supaya bisa merespons dengan cepat. Walaupun laporan tersebut masih samar atau belum detail, informasi itu tetap akan dilanjutkan dengan proses penyelidikan.

"Kami langkahkan ke penyelidikan kalau bayang-bayang. Seluruh laporan dari masyarakat selalu kami tindaklanjuti walaupun langkahnya apa, kalau ada tindak pidana maka kami sidik. Tapi kalau belum jelas apakah ini tindak pidana atau bukan, siapa pelakunya pasti kami selidiki, langkah penyelidikan sedang kami kerjakan saat ini," tegasnya.

Saat disinggung, apakah tindakan ini mengarah pada satu kelompok dan diduga sengaja untuk membakar. Ronaldo tidak berani menduga-duga, menurutnya akan lebih leng-

kap jika masyarakat memasukkan laporan dan memberikan keterangan komperhensif lanjutnya. Kata Ronaldo, dia telah memerintahkan personel untuk menyusuri satu per satu informasi. Selain itu, patroli akan dilakukan dan intensitasnya ditingkatkan.

"Namun tidak bisa diselesaikan jika tidak ada peran serta masyarakat. Masyarakat juga waspada Ketika melihat sesuatu segeralaporkan ke petugas, dan nanti petugas cepat bergerak ke lokasi kejadian," ucapnya.

Selain tetap waspada, lanjutnya, warga diimbau tidak main hakim sendiri. "Jika ada sesuatu mencurigakan segera lapor petugas. Nomor pengaduan ada di media sosial, nomor telpon Kapolres, program tangguh menangkap pelanggaran, kaitan narkoba ada balak enam, semua sudah dishare, gunakan dengan bijak," tandasnya. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya
Editor: Andhika

Sebelum Rumah Dewi Hampir Dibakar, Sempat Lihat Mata Muncul di Lubang

TARAKAN - Teror bakar rumah kembali terjadi di Kota Tarakan. Setelah sebelumnya terjadi aksi percobaan pembakaran rumah di RT 20 dan 8 Selumit Pantai. Kali ini teror kembali terjadi di rumah yang disewa Dewi (24), yang berada di RT 19 Kelurahan Selumit Pantai Kota Tarakan.

Dewi mengatakan kejadian itu terjadi pukul 22.30 Wita, Kamis (7/9/2023), saat ia sedang ingin buang air kecil. "Pas aku mau jongkok, kaki ku kena air. Pas aku bebalik muncul juga matanya. Disitu lah aku kaget," ungkapnya.

Kata Dewi, setelah kejadian tersebut ia tak sadar dan langsung gemetar. Ia pun langsung mencium bau minyak tanah. "Gak tau karena waktu bertatapan aku langsung lari karena sangking takutnya karena baru-baru lihat begitu. Tapi matanya aja keliatan karena dia pakai masker. Matanya aja keliatan karena disitu lobang kecil," bebernya.

Saat kejadian tersebut, Dewi hanya berdua dengan anaknya sebab suami sedang berada di luar rumah. "Suami ada urusan dengan mandor karena kerja rumput laut," lanjutnya.

Sementara, menurut saksi lainnya Irfan (26), kemungkinan pelaku masuk melalui sela yang berada di samping rumah. "Kemungkinan dia lewat samping karena bisa berdiri, karena dia (korban, red) jongkok disini, dia dari samping sini (pelaku, red)," jelasnya.

Terpisah, Ketua RT 19 Muhammad Johansyah (64), membenarkan kejadian tersebut. Saat kejadian, dia bersama warga sedang standby untuk melakukan ronda malam. Namun tiba-tiba saja terdengar suara teriakan.

"Tiba-tiba orang sebelah teriak bilang ada orang menyiram minyak tanah ada buktinya kayu-kayu," ungkap Johansyah.

Saat tiba dilokasi, penghuni rumah langsung pingsan. Kata Johansyah, dia menerima laporan kurang lebih pada pukul 22.30. "Lagi disini kami kumpukan belum waktunya meronda tapi sudah siap kumpul diposko ini," tandasnya.

Untuk mencegah kejadian ini berulang, dia bersama warga pun kembali melanjutkan ronda. (apc/and)

Reporter: Ade Praselia
Editor: Andhika



Irfan, saksi mata saat sedang menerangkan kronologis kejadian di Tempat Kejadian Perkara (TKP). ADE/MKR



Dewi, penghuni rumah yang hampir di bakar. ADE/MKR



Ketua RT 19 Muhammad Johansyah. ADE/MKR



ADE/MKR

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan, Agus Sutanto.

Buntut TKA Cina Aniaya Pekerja Lokal di Tarakan, Pelaku Akan Dipulangkan

TARAKAN - Kasus dugaan tindak kekerasan yang dilakukan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Cina terhadap pekerja lokal berakhir dengan mediasi. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan, Agus Sutanto kepada awak media di Tarakan, Kamis (7/9/2023).

Agus mengatakan beberapa hal telah disepakati dalam mediasi tersebut, di antaranya pelaku menanggung biaya pengobatan korban kemudian membayar denda adat, serta pelaku harus dipulangkan.

"Kebetulan kasus yang pemukulan kepada pekerja lokal, sesama teman, karena itu ranah kriminal jadi penegak hukum. Kemarin kan sudah ada solusi sudah di musyawarahkan mufakat sudah selesai, tetap ada tuntutan tapi sudah terpenuhi untuk pengobatan dibiayai dan kemudian dari denda adat juga siap untuk mem-

bayar dan ada tuntutan pekerjanya dipulangkan oleh perusahaan yang mempekerjakan sudah clear lah," ungkapnya.

Agus menyesalkan kejadian ini, kata dia, untuk menghindari kejadian ini agar tak terulang pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak manajemen. "Perusahaan harus memberikan pengarahannya agar kejadian itu tidak terjadi lagi. Sehingga tidak ada unsur kekerasan dan harus hati-hati saling menjaga," katanya.

Saat ditanya terkait kapan TKA tersebut dipulangkan, Agus menjawab bahwa dia belum mendapat informasi namun yang pasti pemulangan tersebut akan dilakukan secepatnya. "Yang jelas sudah ada komitmen. Nanti perusahaan ditunggu aja informasinya dipulangkan kapan kan kewajiban perusahaan yang melaporkan kalau orangnya dipulangkan

dikeluarkan dari data laporan bulan berikutnya biasa," ucapnya.

Agus mengungkap berdasarkan pendataan, saat ini ada 83 TKA itu yang di wilayah Tarakan." Ada juga yang wilayahnya se-kaltaras semuanya ada seratusan, perusahaannya di Tarakan tapi wilayah kerjanya di luar seperti Bulungan dan lain-lain. Staynya banyak di Tarakan tapi itu kewenangannya provinsi sebetulnya," tuturnya.

Adapun rincian TKA tersebut tersebut di beberapa perusahaan seperti PT Phoenix berjumlah 25, PT Pipit mutiara 8, Tanjung Mas Perkasa 1, PT Idec Abadi Wood 12, PT Mustika Minanusa 5, PT China Boad and Bridge 13, dan PT Handal Energi Indonesia 19. (apc/and)

Reporter: Ade Praselia
Editor: Andhika



ADE/MKR

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Kelas II Tarakan Bona Roy Simanungkalit.

Imigrasi Tarakan Sebut Rutin Awasi Orang Asing, Per Agustus 2023 Ada 275 WNA

TARAKAN - Kantor Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksa Imigrasi (TPI) Tarakan fokus terhadap pengawasan orang asing masuk ke Tarakan. Hal ini perlu sebagai bentuk kewaspadaan terhadap dampak negatif dari lalulintas orang asing dan juga untuk menciptakan ketertiban umum dan keamanan di masyarakat.

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Kelas II Tarakan Bona Roy Simanungkalit mengatakan data per Agustus 2023, jumlah orang asing di Tarakan sebanyak 275.

"Jumlah 275 ini adalah orang asing yang memegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dalam rangka bekerja, yakni ITAS biasa 269 orang dan ITAS perairan 6 orang," ucapnya kepada awak media di Tarakan, Kamis (7/9/2023).

Dengan jumlah WNA yang cukup banyak tersebut, pihaknya mengakui rutin melakukan pengawasan orang asing. Adapun pengawasan keimigrasian yang dilakukan yakni berkaitan dengan pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran, kata Bona, maka pelanggaran tersebut akan ditentukan terlebih dahulu. "Apakah bersifat administratif ataupun bersifat tindak pidana Keimigrasian. Setelah itu akan dilakukan penegakan hukum keimigrasian sesuai dengan hasil pemeriksaan yang akan dilaksanakan," katanya.

Selain itu, melakukan pengawasan melalui Tim Pora yang terdiri dari beberapa stakeholder seperti unsur kepolisian, Kejaksaan Negeri Tarakan,

Bea dan Cukai, Kantor KKP, pihak bandara dan pelabuhan, Kesbangpol dan lain sebagainya.

Diketahui, Tim Pora mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi atau lembaga pemerintahan terkait, mengenai hal yang berkaitan dengan pengawasan orang asing dengan melakukan pengumpulan, pertukaran, analisa, evaluasi data dan informasi keberadaan orang asing, penyelesaian permasalahan keberadaan dan kegiatan orang asing, hingga melaksanakan operasi gabungan yang bersifat khusus maupun insidental. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya

Editor: Andhika



Ibrahim Ali Dorong Pelayanan Prima dengan Tingkatkan Layanan Instansi Pemerintah Daerah

TANA TIDUNG- Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, adakan kegiatan coaching clinic dan audiensi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Bertempat di Yuan Garden Pasar Baru, Jakarta Rabu (6/9/2023) kemarin.

Bupati KTT Ibrahim Ali dalam kesempatan itu menuturkan, kegiatan ini mengangkat tema membangun sistem akuntabilitas dalam mempercepat pembangunan dengan mengukur dampak di Kabupaten Tana Tidung.

Selain jajaran Pemkab Tana Tidung, dalam kegiatan yang berlangsung lebih dari satu hari ini, juga melibatkan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas, Aparatur, dan Pengawas dari Kementerian PAN RB. "Kegiatan ini kita lakukan, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan sistem akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah Kabupaten Tana Tidung," ucap Bupati KTT, Ibrahim Ali.

Dia melanjutkan, kegiatan ini begitu penting sehingga peserta yang terlibat untuk mengikuti dengan maksimal. Sehingga manfaat yang didapatkan dapat diimplementasikan untuk pembangunan daerah, khusus di KTT.

"Pembangunan Sistem akuntabilitas kinerja yang baik, itu hal pengen yang akan membantu kita dalam mengukur dampak pembangunan

yang telah dilakukan. Dengan memiliki data dan informasi yang akurat, kita dapat melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan yang tepat guna," tuturnya.

Pada kesempatan itu, dia menyampaikan apresiasi yang tak terhingga kepada pemerintah pusat, khususnya melalui Kemenpan RB, atas segala bentuk perhatian dan kontribusi dalam mendukung pembangunan daerah. "Kegiatan ini sangat berarti bagi kami dalam upaya meningkatkan kinerja instansi pemerintah khususnya di KTT," ujarnya.

"Saya berharap melalui kegiatan ini,

kita dapat memperoleh beragam masukan dan solusi untuk menyempurnakan sistem akuntabilitas yang berjalan saat ini," harap Bupati Ibrahim.

Hal itu semua dilakukan oleh pemerintah daerah, dengan bermuara pada penataan dan pembangunan daerah yang lebih baik. Terutama, harapan besarnya dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dari beragam aspek kebutuhan. Termasuk kebutuhan akan layanan prima oleh pemerintah. **(tin/and)**

Reporter: Martinus Nampur

Editor: Andhika



Bupati KTT Ibrahim Ali paparkan potensi peluang daerah ketika pelayanan dioptimalkan.



RDP. Sekprov Kaltara, Dr H Suriansyah menerima kunjungan masyarakat Krayan di Kantor DPRD Kaltara, Selasa (5/9) lalu.

Pemprov Alokasikan Rp 15 Miliar untuk Perbaikan Jalan Lingkar Krayan

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menerima kunjungan masyarakat Krayan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara, di Tanjung Selor, Selasa (5/9).

Dalam Rapat Dengan Pendapat (RDP), tokoh-tokoh masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Adat Besar Dayak Lundayeh dan Forum Kepala Adat Besar Dayak Lundayeh Krayan membahas kondisi jalan Lingkar Krayan yang mengalami kerusakan serius.

Mewakili Gubernur Kaltara, Sek-

retaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Dr. H. Suriansyah, M.AP, bersama Komisi III DPRD yang dipimpin oleh Albertus Stefanus Marianus, S.T., menerima sejumlah masukan.

Sekprov Suriansyah mengungkapkan bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBD-P) 2023, jalan lingkar Krayan telah dialokasikan sebesar Rp 15 miliar.

“Berkaitan dengan jalan lingkar Krayan, dalam APBD-P tahun 2023, sesuai laporan Sekretaris DPUPR-Perkim Kaltara, telah dialokasikan sekitar Rp 15 miliar. Ini berarti bahwa jalan Lingkar yang menghubungkan 5

kecamatan di Krayan akan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 15 miliar melalui APBD-P 2023,” jelas Sekprov Kaltara.

Selain itu, Sekprov Kaltara juga mendapat masukan menyangkut pelayanan subsidi ongkos barang (SOA) di Krayan, termasuk lokasi tujuannya.

“Agar penanganan SOA lebih efektif di tingkat lapangan, terkait SOA, Sekprov akan memanggil Dinas terkait, yakni Disperindagkop-UKM Kaltara,” tutup Sekprov Kaltara. (dkisp)



SOSIALISASI: Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setprov Kaltara, Imam Pratikno menerima kenang-kenangan pada acara Sosialisasi Cash Management, EDC & QRIS BNI.

Sosialisasikan KKP untuk Pengadaan Barang dan UMKM

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Imam Pratikno, S.IP., M.Si membuka kegiatan Sosialisasi Cash Management, EDC & QRIS BNI.

Kegiatan yang dipelopori Bank Nasional Indonesia (BNI) Cabang Tanjung Selor dalam rangka Optimalisasi Transaksi Non Tunai dan Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKPD) ini digelar Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Gubernur Kaltara, hadir juga pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Modernisasi pelaksanaan angga-

ran pemerintah dalam rangka mendukung program non-tunai dilakukan dengan menggunakan fasilitas kartu kredit dalam transaksi pembayaran belanja pemerintah,” ungkap Imam Pratikno

Definisi kartu kredit pemerintah (KKP) adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD.

Kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh bank penerbit KKP dan instansi pemerintah berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus.

“Jadi penggunaan KKP adalah meningkatkan keamanan dalam bertransaksi mengurangi potensi bah-an dari transaksi secara tunai, serta untuk mengurangi biaya dalam cost off atau idle cost dari pengguna uang persediaan,”katanya.

Penerapan KKP Domestik ini merupakan hubungan bagi pemberdayaan UMKM yang diterbitkan dengan Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro Usaha Kecil Dan Koperasi dalam rangka sukseskan Gerakan Bangga Buatan Indonesia. (dkisp)

Anak Usia 5 Tahun Diduga Terlepas dari Pengawasan Orang Tua

TANJUNG SELOR - Seorang anak dibawa oleh seorang pegawai Bank Mandiri Taspen ke Posko Kepolisian Polresta Bulungan pada Kamis (7/9/2023). Anak ini ditemukan di depan Kantor Mandiri Taspen Jalan Sengkawit, Tanjung Selor, Bulungan, Kalimantan Utara Kaltara.

Diketahui, anak tersebut bernama Elsa dan memiliki usia sekitar 5 tahun. Diduga anak perempuan ini terlepas dari pengawasan orang tuanya.

Suriadni, pegawai Bank Mandiri Taspen yang mengantar anak tersebut ke Posko Polresta Bulungan, mengungkapkan bahwa dia menemukan anak ini di depan kantornya.

Dia telah mencoba menanyakan kepada warga sekitar, tetapi belum ada informasi pasti mengenai kepemilikan anak tersebut. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membawa anak tersebut ke posko kepolisian.

"Bagi siapa pun yang merasa kehilangan anak, silakan segera datang ke Posko Kepolisian Polresta Bulungan," kata salah satu petugas kepolisian yang mengulangi pesan Suriadni.

Sunar, seorang anggota kepolisian yang sedang berjaga, menjelaskan bahwa anak tersebut dibawa oleh seorang petugas bank. "Iya, Pak, kami mohon bantuannya. Tadi ada seorang petugas bank yang membawa anak ini ke sini (Posko Polresta, redaksi). Anak ini ditemukan di depan kantor mereka. Dia dibawa ke sini sekitar pukul 08.30," jelasnya.

Dia juga mengimbau kepada masyarakat yang merasa kehilangan anak untuk segera mendatangi Posko Kepolisian Polresta Bulungan. "Kami sudah mencoba bertanya kepada warga yang datang ke kantor polisi, tetapi se-

bagian besar dari mereka tidak mengetahui. Kami terus berupaya menyampaikan informasi mengenai penemuan anak ini agar bisa diketahui oleh keluarga atau orang yang dekat dengannya," tambahnya. (tin)



Tak Tahu Arah Jalan Pulang, Elsa Akhirnya Dijemput Keluarga

TANJUNG SELOR - Elsa seorang anak perempuan berusia sekitar 5 tahun, dikabarkan sebelumnya tidak mengetahui alamat rumahnya, sehingga diantarkan ke Pos Polresta Bulungan, akhirnya dijemput oleh pihak keluarga.

Kapolresta Bulungan Kombes Pol Agus Nugraha melalui Humas Briпка Hadi Purnomo membenarkan soal penjemputan dari pihak keluarga. "Iya mas, saya mendapatkan informasi dari tim yang piket, anak tersebut sudah dijemput oleh kakak kandungnya," ujar Briпка Hadi Purnomo, melaui pesan singkat WhatsApp pribadinya, Kamis (7/9/2023).

Dijelaskan, bahwa orangtua anak tersebut bertempat tinggal di Satuan Pemukiman (SP) 7 Tanjung Buka, Kecamatan Tanjung Selor, Bulungan.

"Tadi malam bersama kakaknya datang ke Tanjung Selor, mereka tinggal bersama tantenya di Gang Lestari Jalan Sengkawit. Pada pagi hari, anak tersebut ijin untuk jajan dan keluar rumah. Usai membeli jajan ia lupa Jalan pulang dan di dapati oleh pegawai Bank Mandiri Taspen," ujar Hadi sapaan akrabnya.

Ketika hendak diantar oleh pegawai bank, anak tersebut tidak mengetahui arah jalan pulang alias tersesat. "Pegawai bank tersebut, berinisiatif untuk mengantarkan anak tersebut ke Pos kepolisian. Sekitar pukul 08.30 wita, sekitar pukul 10.10 wita anak tersebut dijemput oleh sang kakaknya," ujar dia menceritakan.

Kepolisian terus mengimbau kepada masyarakat, untuk tetap berhati-hati saat menjaga buah hatinya. Karena,

jangan sampai karena keteledoran atau lalai mengakibatkan terjadinya hal yang tidak diinginkan. "Pada prinsipnya ya, pengawasan dari keluarga dan orangtua," pungkasnya.

Pantauan media di lapangan, anak tersebut tampak terlihat aktif bermain dengan petugas piket penjagaan di Polresta Bulungan. Tidak ada rasa canggung dan takut pada dirinya, bahkan di tanya soal namanya ia sesekali menjawab sembari melompat.

"Iya mas, dari tadi kita tanya soal nama dan alamatnya, dia kasitau berubah, kita bersyukur karena telah dijemput oleh pihak keluarganya," pungkas Sunar, anggota kepolisian yang tengah berjaga. (tin/and)

Reporter: Martinus Nampur
Editor: Andhika



PAPARAN: Gubernur Kaltara, Drs. H. Zainal A. Paliwang SH, M.Hum memaparkan potensi Kaltara di Forum ASEAN BAC di Jakarta.

Gubernur Paparkan Beberapa Isu Penting di Forum ASEAN BAC

JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara, Drs. H. Zainal A. Paliwang SH, M.Hum belum lama ini mengikuti Business Roundtable dalam Forum ASEAN Business Advisory Council (ASEAN BAC) di Jakarta.

Borneo Business Roundtable adalah forum komunikasi kerjasama peningkatan ekonomi seluruh wilayah di pulau Borneo yang mencakup Kalimantan, Sarawak, dan Sabah Malaysia serta Labuan dan Brunei Darussalam.

Pada kesempatan itu, Gubernur menyampaikan sejumlah isu strategis di Kaltara. Meliputi isu perdagangan, pembangunan infrastruktur trans borneo dan pengembangan Kawasan Industri Hijau Indonesia

(KIHI) yang ada di Kabupaten Bulungan.

Selain itu juga mengenai upaya reduced emission, deforestation and degradation dan manajemen penggunaan lahan (REDD+) melalui Heart of Borneo seluas 1,2 juta Ha di Kabupaten Malinau.

Menurut Gubernur, isu perdagangan cukup penting lantaran provinsi ke 34 ini melakukan kegiatan perdagangan berupa ekspor hasil pertanian. “Ini selalu kita lakukan sejak dulu. Kita harapkan perdagangan di Kaltara mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi bersama dan kesejahteraan masyarakat,”katanya.

Pemprov, kata Gubernur juga sedang membangun jalan penghubung

dari Malinau menuju Krayan sepanjang 196 kilometer. “Ini bertujuan untuk membuka akses jalan yang menghubungkan Kaltara dengan Malaysia. Tentunya ini akan membuka peluang pertumbuhan ekonomi,” – jelasnya.

Berkaitan dengan KIHI, Gubernur mengungkapkan saat ini tengah berjalan. Ia menargetkan dalam waktu dekat Kaltara sudah memproduksi Aluminium Ingot sebanyak 500 ribu ton per tahun pada 2025. Ia juga menyampaikan, KIHI akan banyak tenant yang masuk. Dari situ, Foreign Direct Investment (FDI) Kaltara akan meningkat, bahkan diprediksi mencapai USD 132 miliar. (dkisp)



PASANG IKLAN HUBUNGI
0811 5405 033

Lebih Dekat dengan Satu Klik



WARGA TUTUP JALAN BATU BARA DAN GALIAN C ILEGAL DI KUKAR

BACA HALAMAN 2-3



USULAN PJ GUBERNUR KALTIM, DPRD KALTIM BELUM PUTUSKAN TIGA NAMA

BACA HALAMAN 35



Warga Desa Batuah, Kukar, Menutup Jalan yang Sering Dilalui Kendaraan Batu Bara dan Galian C Ilegal.

Warga Tutup Jalan Batu Bara dan Galian C Ilegal di Kukar

KUKAR - Masyarakat di Desa Batuah, Dusun Karya Baru, Kecamatan Loa Janan, Kutai Kartanegara menutup jalan sepanjang 2 kilometer 100 meter yang selama ini dijadikan jalur kendaraan batu bara dan galian C ilegal pada Kamis (7/9/2023).

Penutupan jalan ini masih bersifat semi permanen, dengan menggunakan kayu batang pohon akasia selebar kurang lebih 6 meter yang ditancapkan ke tanah.

Salah satu perwakilan warga, Gabriel Philipus Assan, mengatakan bahwa jalan yang dimiliki oleh warga bernama Welly Susanto tersebut sudah digunakan sebagai jalur kendaraan (jalan hauling) batu bara oleh CV. Anggaraksa Adisarana sejak tahun 2017 hingga saat ini.

"Sudah pernah ada pertemuan antara ahli waris dengan pihak tambang. Sudah ada 3 kali pertemuan tapi tidak ada hasilnya," tegasnya.

Lebih lanjut, Gabriel Philipus Assan menjelaskan bahwa pihaknya hanya menuntut kompensasi selama digunakan sebagai jalur kendaraan batu bara atau dibeli dari ahli waris.

"Sejak 2017 sampai saat ini tidak ada kompensasi yang kita dapat. Atau kalau mau, ya dibeli saja lahan ini. Dan ini sudah kami sampaikan ke pihak tambang itu," jelasnya.

Ditambahkan Gabriel, yang menjadi permasalahan, galian C pasir putih



ilegal sudah pernah beberapa kali dilaporkan ke pihak berwajib, dalam hal ini ke Polsek Loa Janan dan Polres Kukar, namun laporan tersebut tidak mendapat tindak lanjut.

"Sudah pernah kami buat laporan. Tapi sampai saat ini tidak tahu

kenapa tidak ada tindak lanjutnya," tambahnya.

Dari pantauan media ini di lokasi, saat dilakukan penutupan jalan tersebut, sudah tidak terlihat aktivitas kendaraan batu bara yang melintas. Bahkan kendaraan truk yang

biasanya mengangkut pasir putih di galian C ilegal juga sudah tidak terlihat. **(Bom)**

Penulis: Aprianto

Editor: Agus Susanto

**JALAN SANTAI
DALAM RANGKA
GRAND OPENING GEDUNG NASIONAL**

JAM 06.00–SELESAI
MINGGU, 03 SEPTEMBER 2023

GEDUNG NASIONAL SAMARINDA
Jl. Panglima Batur No.118, Pelabuhan

Guest Star: KITA PORTUGA, ZIN LIA, ZIN WENI

Sponsored by: ima, KATUJU, fplus

Media Partner: GDN, H. SREHA KOTA JAYA

Organized by: fplus

Supported by: fplus



SAMARINDA

GASTRONOMY PACKAGE



Nikmati penawaran spesial menginap di ibis Samarinda sambil menikmati hidangan lezat di restoran. Hanya dengan tambahan mulai dari Rp 18 ribu, Anda akan mendapatkan fasilitas sarapan dan kredit voucher F&B sebesar Rp 75 ribu di restoran kami.

Dapatkan diskon 5% untuk anggota ALL serta tambahan 10% untuk anggota Accor Plus.

Berlaku hingga 30 Desember 2023

SCAN BARCODE
UNTUK MELIHAT RATE



Informasi selengkapnya hubungi:



@ibishotelsamarinda



0811 - 551 - 6000

all.accor.com



RDP. Sekprov Kaltara, Dr H Suriansyah menerima kunjungan masyarakat Krayan di Kantor DPRD Kaltara, Selasa (5/9) lalu.

Pemprov Alokasikan Rp 15 Miliar untuk Perbaikan Jalan Lingkar Krayan

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menerima kunjungan masyarakat Krayan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara, di Tanjung Selor, Selasa (5/9).

Dalam Rapat Dengan Pendapat (RDP), tokoh-tokoh masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Adat Besar Dayak Lundayeh dan Forum Kepala Adat Besar Dayak Lundayeh Krayan membahas kondisi jalan Lingkar Krayan yang mengalami kerusakan serius.

Mewakili Gubernur Kaltara, Sek-

retaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Dr. H. Suriansyah, M.AP, bersama Komisi III DPRD yang dipimpin oleh Albertus Stefanus Marianus, S.T., menerima sejumlah masukan.

Sekprov Suriansyah mengungkapkan bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBD-P) 2023, jalan lingkar Krayan telah dialokasikan sebesar Rp 15 miliar.

“Berkaitan dengan jalan lingkar Krayan, dalam APBD-P tahun 2023, sesuai laporan Sekretaris DPUPR-Perkim Kaltara, telah dialokasikan sekitar Rp 15 miliar. Ini berarti bahwa

jalan Lingkar yang menghubungkan 5 kecamatan di Krayan akan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 15 miliar melalui APBD-P2023,” jelas Sekprov Kaltara.

Selain itu, Sekprov Kaltara juga mendapat masukan menyangkut pelayanan subsidi ongkos barang (SOA) di Krayan, termasuk lokasi tujuannya.

“Agar penanganan SOA lebih efektif di tingkat lapangan, terkait SOA, Sekprov akan memanggil Dinas terkait, yakni Disperindagkop-UKM Kaltara,” tutup Sekprov Kaltara. **(dkisp)**



PAPARAN: Gubernur Kaltara, Drs. H. Zainal A. Paliwang SH, M.Hum memaparkan potensi Kaltara di Forum ASEAN BAC di Jakarta.

Gubernur Paparkan Beberapa Isu Penting di Forum ASEAN BAC

JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara, Drs. H. Zainal A. Paliwang SH, M.Hum belum lama ini mengikuti Business Roundtable dalam Forum ASEAN Business Advisory Council (ASEAN BAC) di Jakarta.

Borneo Business Roundtable adalah forum komunikasi kerjasama peningkatan ekonomi seluruh wilayah di pulau Borneo yang mencakup Kalimantan, Sarawak, dan Sabah Malaysia serta Labuan dan Brunei Darussalam.

Pada kesempatan itu, Gubernur menyampaikan sejumlah isu strategis di Kaltara. Meliputi isu perdagangan, pembangunan infrastruktur trans borneo dan pengembangan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI)

yang ada di Kabupaten Bulungan.

Selain itu juga mengenai upaya reduced emission, deforestation and degradation dan manajemen penggunaan lahan (REDD+) melalui Heart of Borneo seluas 1,2 juta Ha di Kabupaten Malinau.

Menurut Gubernur, isu perdagangan cukup penting lantaran provinsi ke 34 ini melakukan kegiatan perdagangan berupa ekspor hasil pertanian. "Ini selalu kita lakukan sejak dulu. Kita harapkan perdagangan di Kaltara mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi bersama dan kesejahteraan masyarakat,"katanya.

Pemprov, kata Gubernur juga sedang membangun jalan penghubung dari Malinau menuju Krayan sepanjang

196 kilometer. "Ini bertujuan untuk membuka akses jalan yang menghubungkan Kaltara dengan Malaysia. Tentunya ini akan membuka peluang pertumbuhan ekonomi,"- jelasnya.

Berkaitan dengan KIHI, Gubernur mengungkapkan saat ini tengah berjalan. Ia menargetkan dalam waktu dekat Kaltara sudah memproduksi Aluminium Ingot sebanyak 500 ribu ton per tahun pada 2025. Ia juga menyampaikan, KIHI akan banyak tenant yang masuk. Dari situ, Foreign Direct Investment (FDI) Kaltara akan meningkat, bahkan diprediksi mencapai USD 132 miliar. **(dkisp)**



SOSIALISASI: Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setprov Kaltara, Imam Pratikno menerima kenang-kenangan pada acara Sosialisasi Cash Management, EDC & QRIS BNI.

Sosialisasikan KKPD untuk Pengadaan Barang dan UMKM

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Imam Pratikno, S.IP., M.Si membuka kegiatan Sosialisasi Cash Management, EDC & QRIS BNI.

Kegiatan yang dipelopori Bank Nasional Indonesia (BNI) Cabang Tanjung Selor dalam rangka Optimalisasi Transaksi Non Tunai dan Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKPD) ini digelar Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Gubernur Kaltara, hadir juga pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Modernisasi pelaksanaan angga-

ran pemerintah dalam rangka mendukung program non-tunai dilakukan dengan menggunakan fasilitas kartu kredit dalam transaksi pembayaran belanja pemerintah,” ungkap Imam Pratikno

Definisi kartu kredit pemerintah (KKP) adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD.

Kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh bank penerbit KKP dan instansi pemerintah berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus.

“Jadi penggunaan KKP adalah meningkatkan keamanan dalam bertransaksi mengurangi potensi bahan dari transaksi secara tunai, serta untuk mengurangi biaya dalam cost off atau idle cost dari pengguna uang persediaan,”katanya.

Penerapan KKP Domestik ini merupakan hubungan bagi pemberdayaan UMKM yang diterbitkan dengan Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro Usaha Kecil Dan Koperasi dalam rangka sukseskan Gerakan Bangsa Buatan Indonesia. **(dkisp)**



Wakil Ketua III DPRD Balikpapan, Subari

DPRD Kota Balikpapan dan UGM Gelar FGD Penyusunan Kajian dan Naskah Akademik

BALIKPAPAN - DPRD Kota Balikpapan menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Kajian Akademik dan Naskah Akademik di Hotel Novotel, Kamis (7/9/2023).

Bersama Universitas Gajah Mada, FGD membahas penyusunan 5 pembahasan, yakni 3 kajian akademik tentang wawasan kebangsaan cinta tanah air, penanggulangan masalah sampah pesisir, dan pembentukan museum sejarah.

Sementara 2 naskah akademik yakni membahas Penjelasan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan Perda Nomor 4/2018 tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Manungtung Sukses dan Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Wakil Ketua III DPRD Balikpapan, Subari mengatakan, kegiatan FGD ini berlangsung mulai 7-8 September 2023 dengan narasumber dari para akademisi Universitas Gajah Mada (UGM).

"FGD ini merupakan bentuk kepatuhan pada Peraturan Pemerintah nomor 12/2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPR," ujarnya usai membuka FGD.

Subari menjelaskan, dalam peraturan tersebut disebutkan pasal 5 bahwa Raperda berasal dari DPRD atau Kepala Daerah, di mana rancangan itu disertai penjelasan atau keterangan atau naskah akademik.

"Karena itu, DPRD Balikpapan bekerja sama dengan penyusun dari UGM agar dapat menyusun Raperda yang disertai naskah akademik, pen-

jelasan dan kajian untuk menjawab kebutuhan masyarakat Balikpapan," jelasnya.

Subari berharap melalui FGD ini ada peran aktif dari peserta undangan, selaku dari pihak yang berkaitan dalam tema kajian dan naskah akademik.

"Kami berharap tamu undangan dapat memberi banyak saran agar kami melakukan hasil pengkajian dan bahan-bahan Raperda yang komperhensif, akomodatif dan aplikatif, sehingga kegunaannya positif oleh seluruh lapisan masyarakat," tutupnya. (adv)

Pewartu : Aprianto

Editor : Nicha Ratnasari



Inflasi Dampak Kenaikkan Harga BBM, Andi Faiz Sarankan Pemkot Buat Standar Acuan Harga

BONTANG – Isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mulai berdampak ke beberapa sektor, salah satunya kenaikan harga bahan pokok seperti beras. Kondisi inflasi ini pun dikeluhkan masyarakat yang mulai terdesak dengan himpitan ekonomi.

Ketua DPRD Bontang, Andi Faisal Sofyan Hasdam mengatakan, bahwa upaya Pemkot Bontang dalam mengendalikan inflasi selama ini dirasa sudah cukup. Lantaran pemkot dalam hal ini Diskop UKMP sudah

melakukan yang seharusnya dilakukan untuk mengontrol inflasi.

Tim monitoring inflasi daerah selalu memantau harga pasar. Apabila terjadi kenaikan harga akan mengupayakan untuk menggelar operasi pasar murah. "Saya rasa inflasi di Bontang termonitoring dengan baik. Ketika ada indikasi kenaikan harga, tim dari Diskop UKMP segera turun untuk monitoring dan menormalkan harga-harga," beber Andi Faiz.

Namun begitu menurutnya, ada

satu hal lagi yang perlu dilakukan oleh Pemkot Bontang, yaitu membuat standar harga. Pemkot harus membuat standar acuan atau harga kewajaran dari yang namanya dampak kenaikan BBM.

"Hal itu supaya tidak membunuh pelaku usaha dan tidak mencekik masyarakat yang membeli, sehingga perputaran ekonomi di masyarakat bisa tetap berjalan," pungkasnya. (al/adv)



ISTIMEWA

Ikon wisata Bontang, Pulau Beras Basah.

Majukan Wisata, BW Sarankan Pemkot Bentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah

BONTANG – Promosi wisata menjadi salahsatu alternatif memajukan sektor pariwisata Bontang. Hal itu disuarakan Anggota Komisi II DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang saat interupsi Rapat Paripurna, Senin (4/9/2023) lalu.

Menurut BW sapaannya, promosi wisata ini menjadi salahsatu cara mewujudkan visi Pemkot Bontang menjadikan Bontang sebagai kota wisata ke depannya.

Dirinya pun mendorong Pemkot Bontang agar membentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD). BPPD diusulkan agar berfokus pada

upaya promosi pariwisata, dengan tujuan mewujudkan Bontang sebagai destinasi pariwisata unggulan pasca industri.

Dikatakannya, beberapa kota di Indonesia sudah membentuk BPPD dan berhasil memajukan sektor pariwisatanya. Di antaranya, Salatiga, Denpasar, Surakarta, Kendal, Gunung Kidul, Kulon Progo, Malang, dan kota-kota lainnya.

“Ini selaras dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2016. Kalau promosi wisata di Bontang ditingkatkan,

saya yakin wisata kita akan banyak pengunjung dari berbagai daerah,” ujar BW.

Ia juga mengungkapkan, regulasi terkait promosi pariwisata di Bontang menjadi salah satu aspek yang sangat penting, dalam menyusun program-program kerja peningkatan pariwisata daerah untuk menarik minat para wisatawan ke Bontang.

“Kalau ada regulasinya dari Dispo-par, saya yakin bisa lebih maksimal lagi dalam bekerja meningkatkan sektor wisata, sesuai dengan kebijakan yang berkaitan dengan peraturan wali kota,” imbuhnya. (al/adv)



ISTIMEWA

Foto SPBU di Bontang.

Andi Faiz Dukung Polisi Berantas Oknum Penimbun di Tengah Isu Kenaikan BBM

BONTANG – Ketua DPRD Bontang, Andi Faisal Sofyan Hasdam menyoroti isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang saat ini tengah terjadi. Kondisi ini berdampak tidak hanya mengulangnya antrian di beberapa SPBU, namun juga kembali munculnya oknum-oknum penimbun dan pengetap BBM.

Menurut Politisi Partai Golkar tersebut, upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani oknum-oknum pengetap dan penimbun BBM itu sudah tepat. Lantaran polisi sudah melakukan pengawasan dengan ketat dan ada tindakan tegas

langsung, saat mengetahui ada oknum yang ketahuan mengetap maupun menimbun.

“Memang kondisi saat ini mudah dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk melakukan penimbunan. Semoga dengan apa yang dilakukan pihak kepolisian beberapa waktu lalu, dengan menangkap pelaku penimbunan BBM memberikan efek jera,” ujarnya usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD, Senin (4/9/2023).

Namun begitu menurutnya, upaya untuk menghilangkan oknum-oknum pengetap dan penimbun ini memang agak sulit dan tidak bisa semuan-

ya diberantas. Lantaran berdampak pada piring nasi masyarakat.

Baginya, para pedagang-pedagang bensin eceran di pinggir jalan itu kondisi khusus dan masih bisa ditoleransi. Karena para pedagang bensin eceran masih mengambil harga yang wajar saat menjual bensin.

“Selama masih batas kewajaran, artinya selama masih menimbun dan mengambil dengan harga wajar, saya kira wajar aja karena hal itu dilakukan untuk piring nasi, bisa ada pengecualian,” ungkapnya. (al/adv)



Siswi Asal Sangatta Utara Sabet Lomba Bertutur Tingkat Provinsi Kaltim

SAMARINDA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Kaltim mengumumkan pemenang Grand Final Lomba Bertutur bagi Siswa SD/MI se-Kaltim tahun 2023.

Azza Ashila, salah seorang siswi dari SD YPPSB 1 Sangatta Utara, Kutai Timur berhasil menyabet gelar juara dengan poin penilaian tertinggi.

Grand Final Lomba Bertutur yang dilaksanakan di Ruang Aula Oemar Dachlan Kantor DPKD Kaltim pada Rabu (6/9/2023) tersebut, menampilkan masing-masing perwakilan dari 9 Kabupaten/Kota, yang sebelumnya sudah juara di tingkat Kabupaten/Kota yang kemudian ditunjuk sebagai perwakilan masing-masing dari daerahnya.

Ditemui di ruangannya, Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca (BP3KM) DPKD Kaltim, Taufik mengatakan dari sembilan peserta, memperebutkan Juara I, II, III, Harapan I, II dan III.

"Juara 1 Azza Ashila dari SD YPPSB 1 Sangatta Utara, Kutai Timur. Juara 2 Arzeli Freya Suntoro dari SDN 01 Sanga-Sanga Kukar dan Juara 3 Malika Khanaya Balqis SDN 023 Sepaku PPU," paparnya.

Taufik menyebutkan bahwa para pemenang akan mendapatkan hadiah berupa piala, sertifikat dan uang pembinaan.

"Untuk Juara 1 akan mendapatkan piala, sertifikat dan uang pembinaan sebesar Rp 7 juta," ungkapnya.

Tanggal 19 September 2023 mendatang para pemenang akan dipanggil kembali ke kantor BPKD Kaltim



Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca (BP3KM) DPKD Kaltim. Taufik

untuk menerima hadiah tersebut.

Diketahui lomba ini diperuntukkan siswa-siswi kelas 4, 5 dan 6 SD/MI (TA. 2023/2024) di wilayah Kaltim dengan ketentuan cerita rakyat daerah Kaltim yang bersumber dari buku.

Dalam lomba ini juga, menghadirkan tiga orang dewan juri profesional

yang berkompeten. Mulai dari psikolog anak, pustakawan nasional dan juga dewan juri utama dari pendongeng Sulawesi Selatan. (adv)

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari

BERIKUT DAFTAR JUARA LOMBA BERTUTUR TINGKAT PROVINSI KALTIM :

Juara 1 : Azza Ashila dari SD YPPSB 1 Sangatta Utara, Kutai Timur.

Juara 2 : Arzeli Freya Suntoro dari SDN 01 Sanga-Sanga Kukar

Juara 3 : Malika Khanaya Balqis SDN 023 Sepaku PPU.

Harapan 1 : Rafli Aulia Nasution dari SDN 008 Bontang.

Harapan 2 : Alifa Alzzahra dari MI Asy-Syifa Balikpapan.

Harapan 3 : Atika Zahra Ratifa dari SDN 016 Tanjung Redeb Berau.



Arzeli Freya Suntoro, pemenang juara 2 Lomba Bertutur Tingkat Provinsi Kaltim.

Pemenang Juara 2 Lomba Bertutur, Arzeli: Nggak Susah, Asal Sering Latihan !

SAMARINDA - Betapa senangnya Arzeli Freya Suntoro berhasil menyalah Juara 2 Lomba Bertutur tingkat Provinsi, yang digelar oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) pada Rabu (6/8/2023).

Dengan tampil semangat di atas panggung, Arzeli membawakan tema cerita "Putri Karang Melenu" yang merupakan cerita dari Istri Pertama dari Maharaja Kutai Aji Batara Agung Dewa Sakti yang merupakan raja pertama Kerajaan Kutai.

"Nggak susah kok membawakannya asal sering latihan," ujar siswa kelas V SDN 001 Sangasanga, Kutai Kartanegara ini.

Walaupun hanya mampu menja-

di Juara 2, Arzeli mengaku sangat bersyukur bisa mewakili Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengikuti Grand Final Lomba Bertutur tingkat Provinsi tersebut.

"YaAlhamdulillah,"ucapnya syukur.

Sementara itu Ibunda Arzeli, Dwi Angga Anggraini, mengaku bangga dengan anaknya yang sudah sampai ke tingkat provinsi.

"Iya sebelumnya, dia kan sudah juara di kabupaten Kukar, ya hasil hari ini semoga bisa, memotivasi dia. Ke depannya, untuk lebih baik lagi," ujarnya.

Diketahui, Lomba Bertutur tingkat provinsi Kaltim ini diperuntukkan siswa-siswi kelas 4, 5 dan 6 SD/MI (TA. 2023/2024) di wilayah Kaltim dengan ketentuan cerita rakyat daerah

ah Kaltim yang bersumber dari buku. Kegiatan ini dalam rangka meningkatkan budaya gemar membaca pada anak-anak yang digelar Pemprov Kaltim melalui DPKD Kaltim.

Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca (BP3KM) DPKD Kaltim, Taufik mengatakan, Arzeli Freya Suntoro bersama lima orang pemenang lainnya akan dipanggil kembali untuk penyerahan hadiah.

"Jadi akan dipanggil kembali tanggal 19 September ini, untuk penyerahan hadiah," ungkapnya. (adv)

Pewartu : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



YAHYA YABO/ MEDIA KALTIM

Kegiatan pertemuan Satgas stunting dengan pengampu kebijakan.

Program BAAS, Upaya Satgas dalam Penurunan Angka Stunting di Bontang

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang terus melakukan penanganan stunting dengan melakukan pertemuan dengan pengampu kebijakan dalam rencana strategi melalui aksi Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) di Kota Bontang. Penanganan stunting di Kota Bontang ini terus dilakukan dengan upaya penurunan angka stunting.

Satgas Stunting Kota Bontang, dr Istiqomah menjelaskan rencana aksi program yang akan dilaksanakan adalah Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) dengan sasaran yang bermitra dengan CSR perusahaan yang memiliki program kesehatan.

“Untuk CSR kan’ ada program kesehatan. Di sini kita bisa melakukan kolaborasi untuk melihat anak ke arah stunting. Kalau stunting permasalahannya bukan hanya gizi, namun ada juga permasalahan lainnya seperti pola asuh,” jelas dr Istiqomah kepada Mediakaltim.com, Kamis (7/9/2023).

Lanjut Istiqomah, peran pemerintah atau dinas kesehatan akan dilaksanakan sebesar 30 persen, namun 70 persennya dilakukan di

lintas sektor.

Pada 2021 angka Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kota Bontang berada di 26,3 persen. Sementara pada tahun 2022 diangka 21 persen di mana ada penurunan sebesar 5 persen. Sedangkan untuk target nasional akan stunting berada di angka 14 persen.

“Kota Bontang kita maunya lebih dari target angka stunting sebesar 12 persen di tahun 2024. Apalagi saat ini sisa tahun lebih kurang 1 tahun,” kata Istiqomah.

Pada tahun 2023 ini, akan dilakukan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) yang saat ini masih berlangsung pengumpulan data yang ditangani langsung dari pemerintah pusat.

“SKI ini nanti yang menangani langsung dari pusat. Untuk hasilnya publikasi datanya di awal tahun 2024. Kalau pemerintah Kota harus turun dari target kemarin (tahun lalu),” katanya.

Istiqomah melanjutkan penanganan stunting yang selama ini dilakukan telah berjalan dengan baik dengan Pemberian Makanan Tambahan

(PMT), intervensi gizi dan lainnya.

“Dari penurunan angka stunting sudah baik. Tapi 21 persen itu masih di atas angka target pusat. Memang PR kita masih banyak untuk menuju 12 persen,” ungkapnya.

Sementara Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB), Hernawati mengatakan tim TPPS Kota Bontang yang terdiri dari beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai tim percepatan penurunan stunting telah melakukan berbagai upaya dalam penurunannya salah satunya program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS). Ia menyebutkan melalui program BAAS ini diharapkan dapat menurunkan angka stunting di Bontang.

“Kalau dari BAAS itu kita tentukan datanya, anak siapa yang akan dijadikan BAAS yang akan berlangsung selama 3 bulan. Akan dipantau kenaikan berat badan dan tinggi,” kata Hernawati. (adv)

Pewarta: Yahya Yabo
Editor: Nicha Ratnasari



Konektivitas ASEAN: Menghubungkan Negara, Infrastruktur, & Perdagangan

JAKARTA - Melewati jalan berliku namun tanpa lubang, memandangi perkebunan sawit, rumah-rumah warga yang berjarak. Sesekali berhenti di rumah makan sederhana sekadar meregangkan otot-otot hingga menapaki jalur aspal lurus membentang ratusan kilometer. Jalur darat menuju Sarawak Malaysia dan Brunei Darussalam, sebuah perjalanan panjang yang menghubungkan tiga negara ASEAN.

Memilih moda transportasi udara mungkin masih menjadi favorit lantaran menawarkan waktu tempuh yang cepat. Namun perjalanan darat juga bisa menjadi alternatif lain karena harga yang terjangkau, khususnya bagi warga Pontianak, Kalimantan Barat.

Memakan waktu kurang lebih 7 jam dari Terminal Antar Lintas Batas Negara Sei Ambawang, Kalimantan Barat, menuju Terminal Sentral Bus Kuching, Sarawak Malaysia. Perjalanan yang lumayan panjang memang, namun ada tempat pemberhentian untuk makan siang atau sekadar beristirahat.

Pemberangkatan dari Sei Ambawang dibagi menjadi dua perjalanan, pagi pada pukul 07.00 WIB dan malam pada 23.00 WIB setiap hari dengan harga tiket Rp270 ribu. Jarak antarkursi lumayan luas, ada pijakan kaki, AC, kompartemen penyimpanan barang pada bagian atas, setop kontak untuk mengisi daya, dan toilet mini.

Fasilitas sama juga ditemui pada bus jurusan Pontianak-Brunei Darussalam. Bedanya, untuk menuju Brunei dibutuhkan waktu kurang lebih 22 jam perjalanan, lantaran jaraknya yang mencapai 1.137 kilometer. Harga tiketnya sendiri mencapai Rp1,1 juta dengan beberapa kali pember-

hentian untuk makan, isi bensin, hingga beristirahat.

Pemberangkatan menuju Brunei Darussalam hanya ada pada hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 07.00 WIB, sedangkan arah sebaliknya pada Selasa, Kamis dan Sabtu.

Perjalanan 7 jam dan 22 jam memang bukan waktu yang sebentar. Namun, bagi sebagian warga Pontianak, ini adalah pilihan terbaik dibandingkan harus terbang ke Jakarta terlebih dahulu kemudian lanjut ke Kuching atau Brunei Darussalam.

Perjalanan antara Indonesia dan Sarawak ini pun terbilang mulus tanpa gangguan. Infrastrukturnya baik

berperan penting dalam memperlancar jalannya berkendara sehingga menimbulkan perasaan nyaman.

Tak heran, banyak mobil dengan pelat kendaraan KB yang berseliweran di wilayah Kuching, Sarawak saking mudah dan terkoneksinya dua negara tersebut.

Begitu pun dengan perjalanan ke Brunei Darussalam. Sebelum ada Tol Pan Borneo yang membentang dari Sarawak, Brunei, dan Sabah, jarak waktu yang ditempuh dari Pontianak ke Brunei bisa mencapai 30 jam.

Namun kini, hanya butuh 22 jam. Yang artinya, infrastruktur ini telah menghemat setidaknya 8 jam per-



ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI/HP

Foto udara Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Senin (14/8/2023).

jalan untuk mencapai kota Bandar Seri Begawan. Nantinya, Pan Borneo juga akan terhubung langsung dengan Indonesia.

KONEKTIVITAS ANTARBATAS

Konektivitas ASEAN digaungkan pertama kali melalui Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC) pada 2010. Ini merupakan program kerja sama antara negara-negara ASEAN dengan membangun keterhubungan transportasi dan infrastruktur di negara-negara Asia Tenggara guna mewujudkan Komunitas ASEAN.

Konektivitas ASEAN ini tidak hanya berbicara soal kesuksesan infrastruktur dan transportasi yang mampu menghubungkan beberapa negara, tetapi juga berkaitan dengan keberlanjutan pembangunan, inovasi digital, logistik tanpa hambatan, regulasi yang unggul serta mobilitas orang.

Data Kantor Imigrasi Entikong, Kalimantan Barat, menyebut pelintas atau pelaku perjalanan luar negeri yang melewati Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong rata-rata 532 pada hari biasa dan 700 pelintas saat akhir pekan. Angka tersebut naik dua kali lipat saat hari libur.

Keperluan kunjungannya pun beragam mulai dari wisata, bisnis, mengunjungi keluarga, bekerja, hingga berobat. Hal ini membuktikan minat warga Indonesia untuk melewati batas negara menggunakan jalan darat cukup besar.

Pihak imigrasi juga memberikan kemudahan bagi warga negara asing (WNA) berupa bebas visa kunjungan dan visa kunjungan wisata kepada 10 negara di ASEAN dengan jangka waktu tinggal selama 30 hari untuk keperluan wisata.

Itu baru dari jalur Entikong. Ke depan, konektivitas antara Indonesia dan Malaysia akan ditambah lewat rute Singkawang-Kuching. Untuk jalur udara, Sarawak, Malaysia dan Brunei Darussalam terkoneksi melalui penerbangan langsung Kuching-Jakarta sebanyak tiga kali seminggu, kemudian Brunei-Jakarta menggunakan maskapai Royal Brunei.

Saat ini, sedang didorong dibukanya kembali rute Pontianak-Kuching yang sangat dinanti oleh kedua negara. Selain itu, rute Balikpapan-Kuching juga menjadi sesuatu yang ditunggu.

Rute tersebut berdekatan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN), diharapkan kehadirannya dapat mendorong potensi kerja sama atau kolaborasi lebih lanjut antara Indonesia dan Sarawak Malaysia.

Konsul Ekonomi Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kuching, Sarawak, Malaysia Theodorus Satrio Nugroho mengatakan persamaan rumpun, bahasa, suku (Dayak), dan wilayah yang berdekatan mampu menghubungkan orang ke orang (people to people) sehingga mampu mendorong bisnis dengan melihat produk apa yang paling dibutuhkan masyarakat setempat.

Kehadiran IKN dianggap sebagai jalan baru untuk lebih menghubungkan negara-negara yang berada di Borneo, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam baik secara infrastruktur, transportasi, maupun ekonomi.

"KJRI terus mendorong berbagai stakeholder untuk bisa suatu saat dibentuk asosiasi UMKM se-Borneo sehingga mereka bisa merasakan juga pertumbuhan Borneo melalui IKN ini," kata Theodorus kepada ANTARA.

UPAYA MEMPERERAT KONEKTIVITAS

Sebagai saudaraserumpun, hubungan Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam terbilang lebih mudah erat. Dengan bahasa yang tidak jauh berbeda, kondisi iklim, dan daerah yang sama, hingga budaya yang saling beririsan, membuat konektivitas ini semakin terjalin.

Tentunya ini tidak lepas dari people to people connection dan hal tersebut bisa menjadi diplomasi jalur kedua, atau di luar jalur formal pemerintah. Misalnya saja, tidak sedikit warga negara Brunei yang mendengarkan lagu-lagu Indonesia, film Indonesia, atau mengikuti gaya busana kaum Muslim.

Kisah, bentuk wajah, dan keseharian yang terjadi di Indonesia sangat relevan dengan kehidupan di sana. Bahkan, tidak sedikit juga warga Brunei yang mengikuti gosip-gosip selebritas Indonesia melalui sosial media atau saluran televisi.

Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Brunei Darussalam Achmad Ubaidillah mengatakan konektivitas antara ASEAN, khususnya Indonesia,

Malaysia, dan Brunei Darussalam yang sudah terbangun, harus terus diperbaharui agar semakin relevan dengan kebutuhan orang-orangnya. Hal tersebut dapat meningkatkan kerja sama di bidang perdagangan, investasi, dan keamanan.

Ke depan dalam bidang perdagangan tentu banyak yang bisa dilakukan karena infrastrukturnya sudah ada, tinggal diperbaharui sehingga konektivitas lebih menjadi sesuatu yang relevan.

Pembaruan ini, salah satunya baru saja dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman perihal kerja sama dan koordinasi dalam rangka peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi Indonesia dengan negara mitra.

Mata uang lokal diharapkan dapat berkontribusi positif pada kegiatan ekspor-impor, investasi, transaksi pembayaran lintas batas, antara lain melalui QR cross border, termasuk dalam memfasilitasi transaksi perdagangan surat-surat berharga.

Bank Indonesia menyebutkan saat ini telah terdapat implementasi kerja sama mata uang lokal antara Indonesia dengan sejumlah negara di kawasan, yaitu Malaysia, Thailand, Jepang, dan Republik Rakyat Tiongkok. Sementara itu, dengan Singapura dan Korea Selatan, telah diperoleh kesepakatan bersama untuk membangun implementasi kerja sama LCT dengan Indonesia.

Selain itu, perlu adanya peningkatan penyelenggaraan festival musik, peragaan busana kelas internasional, pameran seni, serta ajang-ajang lainnya di wilayah Kalimantan untuk semakin menambah kedekatan antarwarga dari ketiga negara.

Terhubungnya negara-negara di kawasan Asia Tenggara menjadikan ASEAN sebagai komunitas satu dan unggul. Terlebih di dalam keketuaan Indonesia pada KTT Ke-43 ASEAN, kawasan ini semakin berperan besar dalam pergerakan roda ekonomi dunia.

Pada akhirnya, cita-cita Indonesia untuk memperkuat ASEAN menjadi kawasan ekonomi yang tumbuh cepat, inklusif, berkelanjutan, dan relevan bagi masyarakatnya, mampu tercipta. (ant/MK)

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Achmad Zaenal M



KESEPAKATAN PERTEMUAN PLENO KTT KE-43 ASEAN



Sesi Pleno KTT ke-43 ASEAN yang diikuti para pemimpin negara, Selasa (5/9), mengadopsi 11 dokumen untuk disepakati. Berikut daftar dokumen tersebut.



DOKUMEN YANG DIADOPSI SAAT PLENO



ASEAN Concord IV sebagai dasar Visi ASEAN 2045

Isi dokumen:
Mempertahankan sentralitas dan persatuan ASEAN



ASEAN Leaders' Declaration on ASEAN Human Rights Dialogue

Memajukan proteksi hak asasi manusia melalui dialog.



ASEAN Declaration on Disability Inclusive Development and Partnership for a Resilient ASEAN Community

Meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam pembangunan.



ASEAN Leaders' Declaration on Early Childhood Care and Education in Southeast Asia

Tekad ASEAN memulai pendidikan sejak dini.



ASEAN Declaration on Gender Equality and Family Development

Meningkatkan inklusivitas gender dalam pembangunan.



ASEAN Declaration on Sustainable Resilience

Manajemen bencana dan kondisi tanggap darurat.



ASEAN Joint Statement on Climate Change to the 28th Session of Conference of the Parties to the UNFCCC COP-28

Komitmen menanggulangi perubahan iklim.



ASEAN Leaders' Declaration on ASEAN as an Epicentrum of Growth

Mendorong ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.



ASEAN Leaders' Declaration on Strengthening Food Security and Nutrition in Response to Crises

Membangun sistem pertanian dan produksi makanan berkelanjutan.



ASEAN Leaders' Statement on the Development of the Digital Economy Framework Agreement (DEFA)

Transformasi digital untuk pertumbuhan ekonomi.



ASEAN Blue Economy Framework

Mewujudkan ekonomi maritim berkelanjutan.

Kesepakatan Pertemuan Pleno KTT ke-43 ASEAN

Sesi Pleno KTT ke-43 ASEAN yang diikuti para pemimpin negara, Selasa (5/9), mengadopsi 11 dokumen untuk disepakati. Berikut daftar dokumen tersebut. (*)

“ Dalam pertemuan Pleno, *leaders* mencatat Visi Masyarakat ASEAN 2045 yang sudah di-*endorsed* para Menteri Luar Negeri ASEAN. Kemudian, pertemuan Pleno mengadopsi 11 dokumen.”



Retno Marsudi
Menteri Luar Negeri



Ukir Prestasi Baru, Badak LNG Raih Penghargaan Internasional dalam Global CSR & ESG Awards 2023

BONTANG – Badak LNG kembali menorehkan prestasi dan diakui secara internasional dengan memperoleh penghargaan dalam ajang The 15th Global CSR & ESG Summit and Awards 2023. Digelar di Vietnam pada Selasa (29/8), penghargaan Kategori Best Community Programme ini ditujukan kepada program CSR Badak LNG yaitu Salin Swara (Sampah Keliling Swadaya Masyarakat).

Ilham Ayuning Tanjung Sari selaku CSR & Community Development Specialist yang hadir saat penerimaan mengatakan penghargaan ini merupakan apresiasi dari komitmen Perusahaan dalam menjalankan ESG.

“Syukur alhamdulillah Badak LNG kembali mendapatkan penghargaan di bidang CSR. Ini merupakan kali pertama kami mengikuti ajang ini dan alhamdulillah mendapatkan penghargaan pada kategori Best Community Programme. Penghargaan ini merupakan apresiasi atas upaya yang telah kami jalankan

dalam menerapkan prinsip-prinsip ESG dalam kegiatan operasional Perusahaan,” tuturnya.

Mengadopsi konsep pengelolaan sampah berbasis masyarakat, Salin Swara merupakan program penge-

lolaan sampah terpadu berbasis investasi pertama di Kota Bontang yang tersebar di lima kelurahan, yakni Satimpo, Berebas Tengah, Bontang Lestari, Gunung Telihan, dan Bontang Kuala.





Melalui program ini, Badak LNG menginisiasi sejumlah kegiatan inovatif sembari bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bontang serta kelompok masyarakat untuk mengatasi permasalahan lingkungan dan sosial dengan menjalin sinergi, berkolaborasi, dan berkomitmen dalam mendukung terwujudnya ekonomi berkelanjutan.

Salin Suara memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah rumah tangga hingga pelatihan pengolahan sampah organik. Selain itu, dilaku-

kan pula kolaborasi dengan bank sampah untuk mengelola sampah non-B3 dari perusahaan menjadi produk bernilai ekonomi yang dilandasi dengan identifikasi permintaan pasar.

Hal ini diimplementasikan dengan pengolahan limbah non-B3 menjadi perahu, baling-baling kapal, bahan bakar ramah lingkungan, dan kotak pendingin yang diminati oleh sebagian besar nelayan di Kota Bontang.

Badak LNG telah menguraikan dampak dari program Salin Suara menggunakan kompas keberlanjutan

dengan melakukan pengukuran dalam lima aspek, yakni lingkungan, sosial, kesejahteraan, ekonomi, serta dampak terhadap masyarakat. Ketika diuraikan, hasil yang diperoleh dari penilaian tersebut meliputi peningkatan jumlah dan pendapatan para kelompok bank sampah, pengolahan 2,2 ton sampah aluminium dari perusahaan, hingga memunculkan budaya baru di dalam masyarakat melalui reduce, reuse, dan recycle yang melibatkan 517 rumah tangga. (adv)



SMK PERTIWI

**10
09
2023**

REUNI

SMK PERTIWI

Angkatan 1997

HOTEL ZURICH BALIKPAPAN

**Ada Game seru, Hiburan, Hadiah,
& Doorprize**

Only **Rp. 50k**

Konfirmasi kehadiran : Masnah

081252119669



PROMO TRAKTIR TEMAN BUY 4 GET 1 FREE

Start From ^{Rp}15.000 nett/person



Nasi Goreng Kampung



Mie Goreng Kampung



Tempe Goreng Tepung



Pisang Goreng Kaya



Teh Tarik Spirit

BEBAS PILIH MENU !

*syarat dan ketentuan berlaku

www.hotelgrandkartika.com/inspirasi



Pendaratan pertama Batik Air di Bandar Udara Kalimantan, setelah sebelumnya berhenti beroperasi lantaran pandemik Covid-19.

Keputusan Batik Air Terbang ke Berau Karena Permintaan Pasar Tinggi

TANJUNG REDEB - Maskapai penerbangan Batik Air yang merupakan anak perusahaan Lion Air Group akhirnya memutuskan untuk mendaratkan pesawat berbadan besar di Bandar Udara Kalimantan Berau, Rabu (6/9/2023) lalu. Keputusan tersebut lantaran potensi pasar yang besar dan permintaan tinggi baik dari wisatawan maupun pebisnis.

Hal itu disampaikan oleh Corporate Communications Strategic Lion Air Group, Danang Mandala Prihantoro. Dikatakannya, keputusan Lion Air Group, termasuk Batik Air, untuk menyediakan layanan penerbangan dari dan ke Berau dipengaruhi oleh sejumlah faktor.

Diantaranya, potensi pasar di Berau mampu untuk Lion Air Group. Yakni, berdasarkan permintaan penumpang yang tinggi, baik dari wisatawan maupun pebisnis, serta kebutuhan konektivitas udara yang lebih baik di daerah tersebut.

Keputusan maskapai penerbangan sering kali didasarkan pada permintaan pelanggan. Jika ada permintaan yang kuat dari penumpang untuk rute tertentu, maskapai cenderung mempertimbangkan untuk menyediakan

layanan tersebut.

Berau juga termasuk sebagai pengembangan wilayah dan menjadi bagian dari rencana pengembangan wilayah di Kalimantan Timur. Perusahaan penerbangan sering kali tertarik untuk mendukung perkembangan wilayah dengan menyediakan layanan transportasi udara yang lebih baik.

"Konektivitas ke destinasi lain di Berau cukup strategis. Dapat berfungsi sebagai pintu gerbang untuk penumpang yang ingin bepergian ke destinasi lain di dalam dan luar negeri. Ini dapat menjadi peluang bisnis yang menarik bagi maskapai penerbangan," jelasnya, Kamis (7/9/2023).

Terkadang keputusan juga dipengaruhi oleh kemitraan atau kerjasama antara maskapai penerbangan dengan otoritas penerbangan atau pengelola bandara setempat. Kerjasama semacam ini dapat memberikan insentif dan dukungan untuk mengembangkan rute baru.

"Lion Air Group memiliki strategi bisnis untuk terus memperluas jaringan mereka, dan Berau adalah salah satu destinasi yang masuk dalam rencana ekspansi mereka," ungkap-

nya.

Saat ini, Batik Air dikenal sebagai maskapai penuh layanan yang menawarkan berbagai kelas dan fasilitas kepada penumpangnya. Sebagai bagian dari Lion Air Group, Batik Air mempertimbangkan berbagai opsi dalam pengembangan bisnisnya, termasuk peluang untuk memasuki segmen pasar Jakarta-Berau dan Surabaya-Berau untuk target wisatawan dan pebisnis, sesuai dengan ada permintaan yang cukup kuat di pasar tersebut.

Komitmen Lion Air Group terhadap pengembangan bisnis selalu berubah sesuai dengan kondisi pasar, kebutuhan pelanggan, dan rencana jangka panjang perusahaan.

"Jika ada permintaan yang signifikan untuk penerbangan LCC ke Berau dan jika itu sejalan dengan strategi bisnis grup, Lion Air Group mungkin akan mempertimbangkan untuk membuka peluang masuknya maskapai LCC ke destinasi tersebut," tandasnya. **(mnz/dez)**

Pewarta: Amnil Izza

Editor: Dezwan

Buper Mayang Mangurai II Mulai Dibangun di Lahan 12 Hektare

TANJUNG REDEB - Bumi perkemahan (Buper) Mayang Mangurai II di Kabupaten Berau sedang disiapkan pembangunannya di atas lahan seluas 12 oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau atas bantuan dari pihak ketiga. Targetnya akan diselesaikan akhir tahun ini.

Pembangunan Buper tersebut berlokasi di Jalan Poros Teluk Bayur Kecamatan Teluk Bayur. Yang ditandai dengan peletakan batu pertama pada Kamis (7/9/2023) oleh Bupati Berau Sri Juniarsih dan Wakil Bupati Berau Gamalis serta Forkopimda. Serta Ketua Kwartir Cabang Pramuka Berau Syarifatul Sya'diah

Bupati Berau Sri Juniarsih menuturkan, atas nama Pemkab Berau sekaligus Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Berau pihaknya merasa bersyukur atas terlaksananya peletakan batu pertama pembangunan Buper Mayang Mangurai II tersebut.

Adapun Buper Mayang Mangurai yang pertama tidak bisa dimanfaatkan karena masuk dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) salah satu perusahaan tambang di Berau. Makanya Buper kedua perlu dibangun untuk mengcover kegiatan kepramukaan di Kabupaten Berau.

"Tentunya ini sudah dinantikan. Karena memang Buper Mayang Mangurai I masuk dalam area konsesi salah satu perusahaan tambang. Serta banyak klaim yang lain sehingga untuk menghindari konflik, dari pihak perusahaan juga menawarkan untuk membangun Buper di atas tanah di atas lahan seluas 12 hektare," jelasnya, Kamis (7/9/2023).

Diungkapkannya, pramuka merupakan adalah organisasi yang berkegiatan di luar ruangan. Pada perjalanannya sangat memerlukan tempat yang representatif untuk berkumpul dan mewadahi kegiatan para anggotanya. Menyadari hal itu pihaknya memutuskan untuk mendukung semua proses pembangunan Buper Mayang Mangurai II hingga bisa difungsikan nantinya.

"Harapannya selesai akhir tahun. Dan doakan semoga proses pembangunan tersebut dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang



Peletakan batu pertama Buper Mayang Mangurai II di Jalan Poros Teluk Bayur Kecamatan Teluk Bayur, Kamis (7/9/2023).

luas bagi kemajuan SDM di Berau," ucapnya.

Sri sendiri berkeinginan agar nantinya Buper Mayang Mangurai II menjadi multi fungsi. Bukan hanya dimanfaatkan sebagai tempat perkemahan saja tapi juga dapat dijadikan sebagai tempat wisata oleh masyarakat. Tentunya juga akan melahirkan pramuka aktif yang memiliki kepribadian tangguh dan berprestasi.

"Saya harapkan adik-adik pramuka mendapat pembinaan yang tepat, karena mereka merupakan SDM di Berau. Ketika dibina dan didampingi mereka akan jadi pengganti kita dan calon pemimpin di masa akan datang," ujarnya.

Selaku Ketua Mabicab, Sri juga berpesan untuk menjaga kekompakan dan rasa persaudaraan. Sehingga pramuka dapat menjadi pemersatu, saling mendukung setiap pergerakan, pramuka bukan untuk memecah belah tapi untuk mempersatukan semua orang.

"Mudah-mudahan tahun depan Kabupaten Berau mampu meraih panji keberhasilan pembangunan I di bidang kwartir cabang gerakan pramuka. Terus giatkan kegiatan pramuka dan dilihat apa indikatornya supaya panji itu tidak direbut kabu-

paten/kota lain," pungkasnya.

Sementara, Ketua Kwartir Cabang Berau Syarifatul Sya'diah mengakui, kondisi Buper Mayang Mangurai II memang tidak memungkinkan pihaknya untuk melakukan kegiatan pramuka di sana. Sehingga memang diperlukan Buper yang baru. Pihaknya bersyukur perusahaan mau bertanggung jawab untuk membangun Buper Mayang Mangurai II. Yang ditarget rampung akhir tahun ini.

"Apalagi ada 3 agenda besar dari Kwartir Kaltim yang kegiatannya akan dipusatkan di Berau.

Mudah-mudahan dalam waktu dekat pembangunan sudah selesai dan kami sendiri juga siap melaksanakan kegiatan di sana," jelasnya.

Peletakan batu pertama Buper Mayang Mangurai sekaligus menepis bahwa sebagai pengurus Kwarcab Berau mengabaikan Buper Mayang Mangurai. Ditegaskannya, enyataannya tidak seperti itu. Pihaknya sudah berupaya sekuat tenaga dan semampu mereka tapi memang tidak bisa dipertahankan.

"Kami hanya pengurusan pramuka dan legalitas kami di Buper Mayang Mangurai I tidak bisa dipertahankan, karena satu dan lain hal," terangnya.

Kendati tidak ingin menghilangkan Buper di Kabupaten Berau, lantaran



masuk dalam IUP salah satu perusahaan tambang, makanya Buper kedua tersebut akhirnya dibangun. Tentunya dengan konsep yang lebih bagus. Serta fasilitas yang mumpuni seperti, air minum, penerangan, dan tempat terpisah bagi putra dan putri.

Ia berharap, selepas pasca tambang Buper Mayang Mangurai I dapat diratakan kembali dan dihidupkan. Sehingga lahannya dapat dimanfaatkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dan digunakan kembali oleh pemerintah daerah dan Kwar-

cab Pramuka Berau.

Di samping itu yak lupa, pihaknya mengucapkan terimakasih kepada Pemkab Berau melalui Dispora Berau yang sudah membantu pihaknya melaksanakan kegiatan pramuka dengan hibahnya yang diterima setiap tahun. Untuk digunakan berbagai kegiatan pramuka.

"Selain itu juga banyak bantuan dari pihak ketiga yang telah mendukung perkemahan dengan menyiapkan lahan ataupun membantu dana untuk kegiatan yang tidak dapat dicover

pemda," tuturnya.

Terlebih para perdahulu yang telah berkontribusi kepada memajukan kepramukaan di Bumi Batiwakkal. "Dengan dukungan semua stakeholder mudah-mudahan pramuka bisa memberikan panji pembangunan keberhasilan kepada pemda," tutupnya. (mnz/dez)

Pewarta: Amnil Izza
Editor: Dezwan





Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Balikpapan.

Wali Kota Balikpapan Minta Warga Tidak Asal Membakar Lahan

BALIKPAPAN - Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) saat ini telah menjadi ancaman di berbagai wilayah Kalimantan Timur, termasuk di Kota Balikpapan. Peralihan, saat ini mengalami musim kemarau panjang yang disebabkan oleh fenomena El Niño.

Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud pun mengimbau warga Kota Balikpapan untuk tidak membakar lahan secara sembarangan.

Menurutnya, tindakan membakar lahan sembarangan dapat memperburuk potensi bencana Karhutla. "Jangan sembarangan membakar hutan, apalagi sekarang kondisinya sedang kemarau," ujarnya.

Rahmad menjelaskan, untuk mengatur masalah ini harus ada regulasi perizinan yang harus diajukan bagi

masyarakat yang ingin membuka lahan.

"Sehingga kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi bisa dihindari, termasuk karhutla," jelasnya.

Banyak hal negatif yang harus diperhatikan ketika seseorang ingin membuka lahan dengan cara membakar. "Karena dalam hutan itu ada makhluk hidup di dalamnya. Adanya karhutla itu, habitat ikut menjadi rusak," tambahnya.

Rahmad Mas'ud juga mengimbau kepada seluruh personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk menggerakkan sosialisasi kepada masyarakat di Kota Balikpapan. "Dengan bersinergi untuk mengedepankan faktor keamanan dalam kehidupan sehari-hari," tambahnya.

Seperti diketahui, hingga September 2023 ini BPBD Kota Balikpapan mencatat ada 48 kasus karhutla yang terjadi di Kota Balikpapan. Jumlah kasus karhutla tersebut diketahui berkategori mulai dari tingkat kebakaran kecil, sedang dan besar.

"Ada dua faktor pemicu bencana karhutla, yakni adanya pembukaan lahan dan fenomena alam," ujar Plt. BPBD Balikpapan, Usman Ali.

Adapun kebakaran lahan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dalam hal pembukaan lahan, menjadi faktor yang paling dominan pada bencana karhutla.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari



Simulasi Kesiapsiagaan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Balikpapan Sport Convention Center (BSCC) Dome Balikpapan pada Kamis (7/9/2023).

Balikpapan Siap Siaga Hadapi Karhutla

BALIKPAPAN - Pemerintah Kota Balikpapan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar apel Kesiapsiagaan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Balikpapan Sport Convention Center (BSCC) Dome Balikpapan pada Kamis (7/9/2023).

Plt. Kepala BPBD Kota Balikpapan, Usman Ali mengatakan, sesuai arahan Wali Kota dalam rangka penanganan kebakaran lahan dan hutan, pihaknya diarahkan dan diperintahkan untuk bersiaga.

"Kami siapkan 6 Pos di setiap kecamatan di UPT masing-masing, ditambah dengan 2 Pos pembantu

dengan Posko PB, jadi semuanya ada 9 Pos yang ini regulasi standby 24 jam," ujarnya.

Lebih lanjut Usman Ali menjelaskan, beberapa titik rawan terjadinya bencana Karhutla di antaranya wilayah Balikpapan Barat, Balikpapan Timur dan beberapa pinggiran jalan Tol Balikpapan-Samarinda.

"Mudahan kita bisa sama-sama peduli akan bencana karhutla, dengan tidak melakukan bakar-bakar, baik itu sampah dan lahan sembarangan," jelasnya.

Hingga September 2023 ini BPBD Kota Balikpapan mencatat ada 48 kasus Karhutla yang terjadi di Kota

Balikpapan. Jumlah kasus Karhutla tersebut diketahui berkategori mulai dari tingkat kebakaran kecil, sedang dan besar.

"Ada dua faktor pemicu bencana Karhutla, yakni adanya pembukaan lahan dan fenomena alam," tambahnya.

Adapun kebakaran lahan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dalam hal pembukaan lahan, menjadi faktor yang paling dominan pada bencana karhutla.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari



ISTIMEWA

Tampak bagian bawah panel tenaga surya milik PLTS Atap PT PHM.

Transisi Energi, Upaya Kurangi Emisi “Jelajah Energi Kaltim” (1) Manfaatkan PLTS, PHM Mampu Kurangi Ketergantungan Listrik PLN di Siang Hari

BALIKPAPAN - Upaya transisi energi, memanfaatkan sumber Energi Baru Terbarukan (EBT), sudah dilakukan oleh PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) dengan memasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di OFG Balikpapan Base Office (BBO). Diketahui, PT PHM menggunakan PLTS tipe On Grid.

General Manager PT PHM, Setyo Sapto Edi, melalui Assistant Manager General Service, Ruslan Rachim menjelaskan pembangkit listrik yang memanfaatkan sinar matahari ini sudah mulai beroperasi sejak 2014 lalu. Dengan masa pembangunan selama setahun sejak 2013. Keterbatasan lahan, menjadi alasan PT PHM memilih atap perkantoran sebagai lokasi memasang 430 unit panel solar.

Dengan ratusan panel yang terpasang, mampu mendukung kelistrikan salah satu gedung selama 12 jam penuh. Terlebih, kembali menggunakan listrik dari jalur PLN. Bahkan, dengan pemakaian yang ada, Ruslan mengklaim masih surplus dan mampu mengaliri listrik gedung lainnya. Di mana rata-rata energi listrik yang dihasilkan tiap bulannya mencapai 2.067 kWh, dari target 1.483 kWh.

Dengan asumsi, energi solar cell rata-rata perhari mencapai 414,6 kWh. Dengan produksi energi rata-rata se-

besar 34,4 kWh, dan konsumsi listrik yang digunakan 21 kWh.

“Kita (PHM) mampu ciptakan efisiensi emisi sebesar 861,1 ton CO₂,” ungkap Ruslan, Rabu (6/9/2023).

Dengan inovasi dan langkah konkret yang dilakukan PT PHM dalam rangka menurunkan emisi karbon, Ruslan menyebut PLTS Atap Off Grid ini akan dipastikan masuk dalam inovasi Green Building Certified garapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Sementara itu, Alvin Siswinugraha, analis Institute for Essential Service Reform (IESR), mengapresiasi langkah transisi energi dari Sumber

Daya Alam (SDA) fosil ke sumber EBT. Bahkan mendorong langkah serupa yang lebih masif lagi, ke beberapa gedung perkantoran lainnya. Baik itu terpasang di atas atap, maupun di atas hamparan lahan (ground-mounted) dengan skala yang lebih besar pula.

“Pemanfaatan PLTS ini tak hanya berpotensi mengurangi biaya operasional dari konsumsi listrik, namun juga menegaskan komitmen terhadap pengembangan EBT,” pungkask Alvin.

Penulis : Muhammad Rafi'i

Editor : Nicha Ratnasari



ISTIMEWA

Salah satu inverter yang berada PLTS Atap yang berada di PT PHM.



RAFI'I/MEDIA KALTIM

Mesin pengolahan gas metana yang berada di TPAS Manggar.

Transisi Energi, Upaya Kurangi Emisi “Jelajah Energi Kaltim” (2) Berkah Tumpukan Sampah, Pengolahan Gas Metana TPAS Manggar Mengaliri 305 Sambungan Rumah Tangga

BALIKPAPAN - Pemanfaatan biogas sebagai sumber Energi Baru Terbarukan (EBT), sudah dilakukan oleh Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Manggar, Balikpapan. Memanfaatkan gas metana yang keluar dari tumpukan sampah yang mengunung. Setidaknya di enam zona penumpukan sampah yang ada.

Memang TPAS yang terletak di RT 36 Jalan Proklamasi, Kelurahan Manggar, ini mulai memanfaatkan gas metana sejak 2012 atau 10 tahun sejak resmi digunakan untuk menampung sampah Kota Balikpapan.

Sampah yang menumpuk dari zona 1 hingga zona 6, akan ditangkap gas metana-nya melalui pipa yang dipasang secara vertikal, dari dasar tumpukan sampahnya. Diketahui, secara biologis tumpukan sampah akan mengeluarkan air pembusukan yang dinamakan Air Lindi. Kemudian diolah dan diproses melalui Leachate Treatment Plant atau Instalasi Pengolahan Air Lindi (IPAL).

“Awalnya digunakan penerangan di TPAS Manggar dan sedikit warga sekitar,” ungkap Muhammad Hariyanto, kepala UPTD TPAS Manggar,

dalam rangkaian kegiatan transisi energi garapan Institute for Essential Service Reform (IESR).

Melihat potensi sumber EBT ini, menarik minat Pertamina Hulu Mahakam (PHM) untuk menggelontorkan bantuan berupa Corporate Social Responsibility (CSR), pada tahun 2018 silam. Hasilnya, tak hanya dimanfaatkan penerangan TPAS Manggar saja. Kini, gas metana hasil pengolahan di TPAS Manggar sudah dinikmati 305 sambungan rumah tangga. Bahkan ada warga sekitar yang merupakan UMKM, turut menikmati saluran gas metana ini.

Itupun hanya dipungut Rp 10 ribu tiap bulan, tiap sambungan rumah tangga. Itu pun kembali dimanfaatkan secara swadaya oleh kelompok yang sudah dibentuk. Entah itu digunakan untuk perawatan infrastruktur sambungan ke rumah-rumah warga.

Kembali lagi, jika berbicara nilai ekonomisnya, warga sangat merasa terbantu dengan adanya potensi EBT gas metana ini. Dengan asumsi pertabungnya seharga Rp 30-35 ribu ditingkat eceran, sangat membantu

mengurangi pengeluaran warga. Terutama bagi pelaku UMKM, apalagi gas LPG 3 kg yang sempat melambung tinggi hingga Rp 40-45 ribu saat adanya kelangkaan. “Warga hanya iuran Rp 10 ribu yang dibayar kepada kelompok swadaya masyarakat atau RT sekitar TPAS Manggar,” lanjut Hariyanto.

“Dari tahun 2020 sampai sekarang tercatat 960 ribu meter kubik gas metana yang mengalir ke rumah-rumah warga,” pungkasnya.

Sementara itu, Manajer Penelitian IESR, Julius Christian, menyebut pemanfaatan gas metana turut mengurangi jumlah emisi atau efek Gas Rumah Kaca (GRK) yang berdampak pada sisi lingkungan. Disamping memberikan bahan bakar gratis bagi warga di sekitar TPAS Manggar.

“Selain itu, pemanfaatan gas metana ini juga mengurangi terjadinya akumulasi gas di timbunan sampah yang berpotensi menyebabkan ledakan dan longsor,” tutupnya.

Penulis : Muhammad Rafi'i
Editor : Nicha Ratnasari



RAFI'/MEDIA KALTIM

BBJP dan Woodchip yang diproduksi TPAS Manggar untuk bahan baku Co-Firing.

Transisi Energi, Upaya Kurangi Emisi “Jelajah Energi Kaltim” (3) Pasok Bahan Baku Co-Firing PLTU, TPAS Manggar Produksi Woodchip dan BBJP

BALIKPAPAN - Produk “sampah” yang berada di Tempat Pembuangan Akhir Sementara (TPAS) Manggar, Balikpapan, tidak hanya dimanfaatkan oleh pengelola dalam menghasilkan gas metana saja. Namun juga memanfaatkan limbah sampah organik berupa potongan pohon dan dedaunan.

Dijelaskan UPTD TPAS Manggar, Muhammad Hariyanto, pun mengatakan menjadikan limbah pohon dan dedaunan menjadi bahan bakar Co-Firing Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Kaltim Teluk Balikpapan.

Yakni sejak 2022 lalu, menjalani kerjasama dengan memasok bahan baku berupa cacahan kayu atau Woodchip yang berasal dari bagian batang kayu. Juga Bahan Bakar Jumptan Padat (BBJP) yang berupa pelet hasil olahan fermentasi sampah dedaunan. Tentunya ini juga sebagai langkah TPAS Manggar untuk men-

urangi jumlah sampah di sana.

“Mulai operasional akhir Juni 2022 sudah mulai produksi berupa pelet dan cacahan kayu,” ungkap Hariyanto.

Sudah berjalan setahun lebih, UPTD TPAS Manggar, sudah secara stabil memproduksi 5-10 ton Woodchip dan BBJP untuk dipasok ke PLTU PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Kaltim Teluk Balikpapan, tiap bulannya. Dengan kontrak kerjasama

ma Rp 400 per kilogram, maka UPTD TPAS Manggar menghasilkan Rp 2-4 juta per bulan yang masuk dalam kas APBD Balikpapan.

“Seiring berjalannya waktu, TPAS Manggar terus meningkatkan kapasitas produksi pelet dan BBJP-nya,” tutupnya.

Penulis : Muhammad Rafi'i

Editor : Nicha Ratnasari





ISTIMEWA

Bupati Kukar Edi Damansyah, saat menyalurkan bantuan pada korban kebakaran di Muara Kaman.

Edi Damansyah Kunjungi Lokasi Kebakaran Muara Kaman Sekaligus Serahkan Bantuan

TENGGARONG- Kebakaran hebat menghanguskan 18 rumah dan 5 bangunan sarang burung walet di Desa Muara Kaman Ulu, Kecamatan Muara Kaman pada Rabu (6/9/2023) kemarin. Mengakibatkan 21 kepala keluarga yang terdiri dari 88 jiwa harus kehilangan tempat tinggal.

Diketahui peristiwa ini terjadi sekitar pukul 16.20 Wita. Api berhasil dipadamkan oleh pemadam kebakaran bersama dengan para relawan serta warga setempat pada pukul 17.45 Wita. Diperkirakan kerugian yang dialami korban akibat kejadian ini mencapai angka Rp 4 miliar.

Kurang dari 24 jam pasca kejadian ini, para korban kebakaran langsung menerima bantuan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar).

Pada pagi hari tadi, Kamis (7/9/2023), Bupati Kukar Edi Damansyah langsung mengunjungi lokasi kejadian. Untuk memberikan bantu-

an secara langsung kepada korban terdampak kebakaran.

Ia menyalurkan bantuan berupa kompor gas, tabung gas, selimut, terpal, minyak goreng, mie instan, perlengkapan bayi, perlengkapan dewasa, dan lainnya. Sekaligus menyerahkan bantuan mesin pompa portable dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmatan) Kukar.

"Bantuan yang kami salurkan ini mudah-mudahan bisa meringankan beban saudara kita yang baru saja terkena musibah," kata Edi.

Edi menambahkan, bantuan yang disalurkan ini merupakan bentuk kepedulian Pemkab Kukar. Menurutnya, membantu sesama merupakan sebuah kewajiban, sudah selayaknya saling membantu jika saudara kita terkena musibah. Sebagaimana slogan pembangunan di era Edi Damansyah dan Rendi Solihin "Betulungan Etam Bisa"

Ia juga berharap, para korban kebakaran ini diberikan ketegaran dan ketabahan dalam menghadapi musibah ini. Sebab ia meyakini selalu ada hikmah di balik setiap peristiwa.

"Harus kita kembalikan bahwa kita punya keyakinan, di balik musibah ini pasti ada hikmahnya dari yang maha kuasa," tambahnya.

Terakhir, Edi Damansyah secara pribadi dan mewakili jajaran Pemkab Kukar. Turut mengucapkan rasa bela sungkawa atas peristiwa yang menimpa masyarakat di RT 06 dan RT 07 Desa Muara Kaman Ulu kemarin.

"Saya turut menyampaikan berbelasungkawa, berduka dan turut merasakan apa yang bapak ibu rasakan," pungkasnya.

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Nicha Ratnasari

Bazar UMKM Titik ke-13 di Long Mesangat

LONG MESANGAT - Tidak terasa Roadshow Bazar Promosi UMKM se-Kecamatan Kutim gelaran Diskop dan UMKMKutim dan Genpro Indonesia kini sudah di titik ke-13. Kegiatan dipusatkan di area Lapangan Sepak Bola Desa Mukni Utama Kecamatan Long Mesangat, Rabu (6/9/2023) malam dan dibuka langsung oleh Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman diampingi Kepala Diskop dan UMKM Kutim Darsafani, Kepala DPMDes Kutim Yuriansyah, Kepala DTPHP Kutim Dyah Ratnaningrum, Camat Long Mesangat Rafichin dan sejumlah undangan yang hadir.

Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengapresiasi gelaran Bazar Promosi UMKM Kutim sudah di edisi ke-13 Long Mesangat.

"Para peserta berasal dari dari program bantuan keuangan khusus untuk RT sebesar 50 juta, dimana Rp 10 jutanya untuk pemberdayaan SDM dalam menggerakkan pelaku UMKM. Alhamdulillah seluruh peserta berpartisipasi dalam pameran UMKM, Kutim terus melaju dalam ekonomi kerakyatan di Long Mesangat ini," tegasnya.

Ia kembali mengemukakan semoga dari pelaku UMKM di Long Mesangat, ada yang masuk kurasi produknya oleh tim penilai Diskop UMKM dan Genpro untuk bisa dibawa ke tingkat Expo Nasional.

"Saya harap ada muncul produk khas dari Long Mesangat ini. Sebelumnya di Expo UMKM yang digelar di Bali, sebanyak 11 produk Kutim mendapatkan apresiasi bagus karena diminati oleh pelaku regional hingga internasional. Produk itu seperti gula merah cair dan juga amplang batu bara," urainya.

Selanjutnya, Ardiansyah berharap para pelaku UMKM terus bisa diberikan ruang berkreasi melakukan pameran UMKM.

"Ke depan, bisa menembus lokal market kemudian ke market nasional dan global market. Karena apa, Diskop UMKM Kutim juga sudah memberikan pelatihan demi pelatihan untuk pelaku UMKM dan tentunya staf koperasi bisa mempunyai skill dalam arti keterampilan memasarkan produk beserta lainnya," pesannya.



Senada, Kepala Diskop dan UMKM Kutim Darsafani mengutarakan jika adanya bazar selama 5 hari ini dapat menumbuhkembangkan perekonomian di masyarakat khususnya warga Long Mesangat.

"Kegiatan titik ke-13 ini istimewa, karena peserta Bazar Promosi UMKM yang ikut, sebelumnya sudah mendapatkan pelatihan UMKM. Di mana yang kita lakukan, seperti pengemasan produk yang menarik dan bagaimana meningkatkan SDM UMKM dan pengurus koperasi," bebernya.

Selanjutnya, dalam pelatihan UMKM dan koperasi yang sudah digelar untuk di anggaran murni ada 34 pelatihan dan selanjutnya di anggaran perubahan ada 5 pelatihan.

"Jadi totalnya ada 39 pelatihan yang digelar, dirincikan 10 pelatihan berfokus pada kelembagaan, 10 untuk peningkatan SDM UMKM dan koperasi serta 19 untuk koperasi," jelasnya.

Ia menambahkan di negara maju, SDM yang perlu ditingkatkan. Diskop dan UMKM berupaya mempromosikan titik ke-13 ini.

"Hasilnya nanti ada produk yang bagus dan bisa dibawa untuk dipamerkan di Jakarta dan Yogyakarta. Untuk diketahui, 20 UMKM kita su-

dah masuk e-katalog jadi bisa belanja lewat online," urainya.

Kemudian, pihaknya sudah mendorong untuk Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

"Kini sudah ada 7 produk UMKM Kutim telah direkomendasikan ke Kemenkumham Kaltim seperti diantaranya aren melambai, beras lokal payau dan arit lepo batik. Semua terus didorong pelaku UMKM mendapatkan HAKI jadi kita terus mendorong UMKM di hak-haknya produksi olahannya berjalan dengan sempurna dan baik. Tahun depan kita terus meningkatkan UMKM dengan kolaborasi dengan koperasi," terangnya.

Camat Long Mesangat Rafichin bersyukur daerahnya menjadi lokasi titik ke-13 gelaran Bazar Promosi UMKM Kutim.

"Alhamdulillah kita mendapatkan bagian dari kegiatan untuk ruang berkarya dan berkreasi menampilkan produl UMKM khususnya Long Mesangat. Semoga acara ini menimbulkan semangat dan gairah mengembangkan UMKM Long Mesangat, karena dari 7 desa semua berpartisipasi dalam kegiatan ini," singkatnya.



Salah satu akses jalan penghubung Batu Engau-Tanjung Harapan.

Berkat El Nino, Proses Pembangunan Infrastruktur Jalan di Paser Lancar

PASER - Fenomena pemanasan Suhu Muka Laut (SML) di atas kondisi normal yang memicu terjadinya kondisi kekeringan untuk wilayah Indonesia secara umum atau biasa disebut El Nino. Kondisi ini dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser untuk percepatan pembangunan.

Meski pengaruh El Nino berdampak negatif pada tingkat produktivitas pertanian, namun bagi Pemkab Paser, hal itu justru memperlancar proses pembangunan infrastruktur yang jadi keluhan masyarakat selama ini.

Salah satunya pembangunan infrastruktur jalan dari Kecamatan Batu Engau menuju Kecamatan Tanjung Harapan yang hingga kini lancar tanpa hambatan cuaca atau iklim. Jika sebelumnya jalur darat menuju Tanjung Harapan terbilang sulit, kini hal itu mudah diakses.

Apalagi, baru-baru ini Bupati Paser, Fahmi Fadli, menyempatkan diri untuk berkunjung ke Desa Tanjung Aru, Kecamatan Tanjung Harapan via darat. Peralnya selama ini, untuk menuju desa tersebut mengandal-

kan alternatif jalur laut.

"Sekarang akses dari Kerang (Batu Engau) ke Tanjung Aru sudah bisa lewat darat," kata Fahmi, Kamis (7/9/2023).

Untuk diketahui, akses dari Desa Kerang, Kecamatan Batu Engau menuju Desa Tanjung Aru, Kecamatan Tanjung Harapan dahulu tidak dapat ditempuh via darat. Alternatifnya, warga terpaksa melewati perbatasan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk mencapainya.

Dengan tidak adanya akses jalan, kebutuhan dasar masyarakat seperti listrik dan jaringan internet juga terkendala. Namun kini hal itu perlahan mulai teratasi. Meski belum mulus dengan baik, namun ke depan, terus dilakukan peningkatan jalan di daerah tersebut.

"Namun tentunya itu semua butuh proses, semua butuh perjuangan, dan semuanya butuh usaha yang keras," ucapnya.

Fahmi menyebut, peningkatan infrastruktur di Kabupaten Paser khususnya jalan, tengah berproses "Progres jalan masih dilakukan, be-

berapa sudah dilaksanakan peningkatan jalan menggunakan beton perkerasan kaku (Rigid). Peningkatan dilakukan secara bertahap," ujarnya.

Untuk diketahui, khusus dari Desa Kerang, Kecamatan Batu Engau menuju Desa Senipah, Kecamatan Tanjung Harapan, DPUTR Kabupaten Paser melangsungkan perbaikan di rias jalan yang dibagi menjadi 7 segmen.

Di antaranya, segmen Desa Kerang menuju Desa Mengkudu sepanjang 12,593 km, Desa Mengkudu-Desa Lomu dan Desa Pengguren sepanjang 7,566 km, Desa Pengguren-Desa Segendang dan Desa Keladen sepanjang 15,845 km.

Selain itu Desa Keladen menuju Desa Random sepanjang 11,943 km, Desa Random menuju Desa Tanjung Aru sepanjang 29,062 km dan segmen Desa Random menuju Desa Senipah sepanjang 5,599 km.

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari

Dugaan Penyalahgunaan Wewenang, Sekretaris TP-PKK Paser. Namanya Juga Tahun Politik

PASER - Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Paser memilih tak ingin menanggapi dugaan penyalahgunaan wewenang yang diarahkan kepada ketuanya, yakni Sinta Rosma Yenti, istri Bupati Paser, Fahmi Fadli.

Dikonfirmasi soal dugaan penyalahgunaan kekuasaan dengan meminta fotokopi KTP warga, Sekretaris TP-PKK Kabupaten Paser, Yola Yusuf, tak ingin menanggapi terlalu jauh. Bahkan dia berdalih, fenomena tersebut terjadi lantaran tahun politik.

"Namanya juga tahun politik, pasti apapun yang dilakukan disorot," kata Yola Yusuf, Rabu (6/9/2023).

Dikabarkan sebelumnya, Sinta Rosma Yenti tengah jadi sorotan jagat media sosial, lantaran diduga mengintruksikan kelompok ibu-ibu yang tergabung dalam Dasawisma dan Rukun Tetangga (RT) untuk mengumpulkan fotokopi KTP warga.

Permintaan pengumpulan fotokopi KTP warga itu ditujukan sebagai bentuk dukungan terhadap istri Bupati Paser, Fahmi Fadli itu, yang akan maju sebagai calon anggota legislatif (Caleg) DPD RI daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Timur.

Perihal adanya cuitan dengan dilengkapi tangkapan layar yang diposting pada Minggu (3/9/2023) Yola telah melihatnya. "Sempat baca, tapi biasa saja saya menanggapi. Teman-teman (PKK) enggak ada juga yang komentar apa-apa dan enggak juga menanyakan," terang dia.

Katanya, saat ini TP-PKK fokus pada agenda atau kegiatan yang telah direncanakan. Disinggung adanya pesan berupa permohonan pengumpulan fotokopi KTP untuk syarat maju DPD RI, dia tak mengetahui adanya pesan tersebut melalui aplikasi percakapan singkat.

"Nah saya enggak tahu. Pesan itu ada yang kirim, saya enggak tahu juga sih, enggak ada juga yang nanya kepada saya. Kami (PKK) sih santai saja dan fokus pada kegiatan yang sudah direncanakan," tutur Yola.

Kendati sudah mendapat konfir-

masi dari pihak TP-PKK Kabupaten Paser, namun berbagai upaya untuk mendapatkan konfirmasi dari yang bersangkutan belum didapati media ini. Adapun upaya konfirmasi masih tengah dilakukan agar mendapat penjelasan yang lebih akurat.

Sebelumnya, beredar informasi bahwa Sinta Rosma Yenti diduga mengancam akan memotong Dana Desa jika warga tidak memilikinya. Hal ini terungkap dari cuitan @mazzini_gsp yang mengunggah bukti

keluhan masyarakat atas yang tidak diketahui identitasnya.

Sementara, terhadap adanya upaya penelusuran yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Paser, terhadap informasi tersebut, juga belum berbuah hasil. Atas kejadian ini, turut menggerakkan warga di media sosial.

Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari





ROBBI/MEDIAKALTIMGROUP

Bupati PPU, Hamdam Pongrewa saat pelantikan dan pengambilan sumpah 193 pejabat di posisi baru, Kamis (7/9/2023).

Ujung Masa Jabatan, Hamdam Mutasi 193 Pejabat

PPU - Di ujung masa baktinya menjadi Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Hamdam Pongrewa masih sempat melakukan mutasi jabatan terhadap 193 pejabat Administrator, Pengawas dan Fungsional di lingkungan Pemkab PPU, Kamis (7/9/2023).

Seperti diketahui, masa jabatan kepemimpinannya akan berakhir pada 19 September 2023 mendatang. Hal ini dilakukannya murni untuk menciptakan peningkatan mutu good governance.

Hamdam mengatakan pengembangan karier pegawai tidak dilakukan semata-mata untuk kepentingan pegawai yang bersangkutan. Melainkan tapi lebih dari itu, pelantikan untuk pembenahan dan pematapan organisasi dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas dan kinerja pelayanan publik.

"Saya berharap kepada seluruh pejabat yang telah dilantik agar segera melaksanakan tugas sebaik-baiknya

menjunjung tinggi profesionalisme dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya," katanya.

Ia juga menginstruksikan para Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat dengan cepat menyesuaikan diri pada unit kerja masing-masing. Guna memastikan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan waktu yang telah ditentukan.

"Kerja keras dan karya nyata sangat menentukan keberhasilan program dan kegiatan pada satuan kerja. Perlu dan wajib diingat bahwa, jabatan adalah ujian dan yang diberi ujian wajib lulus dengan nilai yang terbaik," lanjutnya.

Untuk diketahui pula, rotasi jabatan yang dilaksanakan di Aula Lantai 1 Islamic Center Penajam, Kilometer 9 Nipah-Nipah ini merupakan ke-4 kali dilakukan dalam masa kepemimpinan Hamdam. Sebelumnya pada Januari 2023 dengan melantik 135

pejabat di posisi baru.

Kemudian Maret 2023, yang terdiri dari 12 pejabat di tataran eselon II. Lalu pada Juli 2023, yang berisikan 10 jabatan tinggi pratama (JPT) di lingkungan Pemkab PPU.

Lebih lanjut, Hamdam pada momentum ini juga mengingatkan untuk seluruh pegawai dapat melakukan introspeksi. Lalu berupaya semaksimal mungkin untuk terus memberikan inovasi pelayanan yang paripurna.

"Apakah kontribusi sudah maksimal dan sebanding dengan apa yang telah masyarakat PPU berikan."

"Niatkan kembali diri kita untuk lebih bekerja dengan ikhlas serta penuh inovasi demi mewujudkan birokrasi yang bersih, memasyarakat dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.

Pewarta : Nur Robbi

Editor : Nicha Ratnasari

Setelah Gunadarma, Giliran Unpar Bandung Rencana Bangun Kampus di PPU

PPU - Setelah kampus Universitas Gunadarma resmi hadir di wilayah Penajam Paser Utara (PPU), kali ini giliran Universitas Parahyangan (Unpar) yang berencana melaksanakan pembangunan gedung di daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) ini.

Pembuktian itu dimulai dengan peletakkan batu pertama pembangunan asrama mahasiswi dan fasilitas pendidikan perguruan tinggi yang berpusat di Bandung, Jawa Barat itu. Gedung itu nantinya akan berada di Jalan Pipa Pertamina, Kilometer 8 Nipah-Nipah, Kamis, (7/9/2023).

Rektor Unpar, Tri Basuki Joewono mengatakan dirinya berharap kegiatan tidak berhenti sampai di sini. Agar segera proses aktivitas pengembangan sumber daya manusia (SDM) Benuo Taka segera terwujud.

"Dalam tahapan pembangunan Unpar, sesungguhnya kami telah melalui proses yang cukup panjang," ujarnya.

Di antaranya terkait proses perizinan pembukaan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU). Termasuk proses pengajuan-pengajuan proposal instrument untuk memasukan izin pembukaan prodi.

Untuk tahap awal, Unpar rencananya nanti akan membuka tiga program studi (prodi) di kabupaten PPU. Masing-masing Ilmu Administrasi publik, Administrasi Bisnis dan Hukum.

Alasannya ialah mempertimbangkan bahwa pusat pemerintahan IKN akan sangat membutuhkan ahli-ahli ilmu di bidang tersebut.

"Yang diperlukan untuk warga adalah ilmu yang berhubungan agar bisa berkontribusi secara nyata di pusat pemerintahan IKN dengan ilmu-ilmu tersebut. Sehingga diharapkan pada 2024 pihaknya sudah bisa menerima dengan tiga prodi yang ada tersebut," jelas Tri.

Sementara itu, Bupati PPU Hamdam menyebutkan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) PPU sudah menjadi keniscayaan yang harus dilakukan. Khususnya dalam rangka menyambut pemindahan

pusat negara Republik Indonesia di Kaltim.

"Kami menyadari betul bahwa SDM Kita ini mungkin dapat dikatakan masih rendah walaupun ada juga yang telah mampu bersaing dengan pendatang dari luar PPU," katanya.

Ia menilai, hadirnya Unpar yang merupakan salah satu universitas swasta memiliki akreditasi unggul di Indonesia. Walaupun memiliki dasar agama tertentu, ia menjamin sesungguhnya universitas ini diperuntukkan untuk mahasiswa umum.

"Tetapi sebagian besarnya pastilah belum mampu bersaing sehingga pemda harus melakukan sesuatu. Harus ada upaya bagaimana menyiapkan tempat untuk putra-putri daerah ini agar bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau," sambungnya.

Maka dari itu, kehadirannya di PPU tentulah perlu diapresiasi. Sebab, hanya di PPU Unpar Bandung berminat mendirikan kampus dan yayasan di

daerah lain.

"Ini satu penghargaan bagi kami. Karena Unpar ini satu-satunya pengelolaan PSDKU ada di PPU," sebut Hamdam.

Harapannya, pembangunan yayasan tersebut prosesnya dapat berjalan lancar dan tidak terlalu lama. Bahkan jika memang memungkinkan pada 2024 mendatang sudah bisa menerima mahasiswa baru.

"Ini adalah kampus kedua di PPU, setelah sebelumnya telah diresmikan Universitas Gunadarma beberapa waktu lalu. Harapan kita, langkah-langkah Pemerintah Daerah melalui kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi di Indonesia ini mampu meningkatkan SDM Kita ke arah yang lebih baik, dalam rangka menyongsong pembangunan IKN ke depan," tutup Hamdam.

Pewarta : Nur Robbi

Editor : Nicha Ratnasari



ROBBI/MEDIAKALTIMGROUP

Bupati PPU Hamdam Pongrewa bersama Rektor Unpar Bandung Tri Basuki Joewono saat seremonial peletakkan batu pertama pembangunan, Kamis (7/9/2023).



DOKUMENTASI

Rapat Paripurna DPRD Kaltim

Jelang Tenggat Waktu Usulan Pj Gubernur Kaltim, DPRD Kaltim Belum Putuskan Tiga Nama

SAMARINDA - Tenggat Waktu usulan nama Bakal Calon Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim akan jatuh pada hari Jumat (8/9/2023). Namun DPRD Kaltim belum memutuskan tiga nama yang akan di bawa ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud mengungkapkan, ada lima nama yang telah dihimpun berdasarkan usulan delapan Fraksi DPRD Kaltim. Nama tersebut yakni, Sri Wahyuni Sekdraprov Kaltim, Rektor Universitas Mulawarman Abdunnur, Deputi Bidang Sosial dan Budaya Badan Otorita IKN, Alimudin, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag H Kamaruddin Amin, dan Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik.

DPRD Kaltim pun sebutnya sudah menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) membahas tiga nama yang akan di usulkan ke Kemendagri. Namun belum ada keputusan siapa saja yang

akan menjadi rekomendasi "Karang Paci". Dan mengingat besok, Jumat (8/9/2023) adalah batas akhir DPRD Kaltim menyampaikan usulan, maka malam ini, Kamis (7/9/2023), DPRD Kaltim akan kembali menggelar rapat ditingkat pimpinan DPRD Kaltim.

"Malam ini (Kamis), rencananya akan kembali melaksanakan (rapim)," jelasnya usai memimpin Rapat Paripurna ke-29, Kamis (7/9/2023).

Lambannya proses penetapan tiga nama usulan Bakal Calon Pj Gubernur Kaltim oleh DPRD Kaltim, sebut Hasan, karena tidak adanya aturan teknis yang jelas.

DPRD Kaltim saat ini sebutnya, hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Un-

dang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Sehingga muncul opsi untuk mengajukan lima nama yang telah dihimpun berdasarkan usulan masing-masing fraksi. Adapula masukan dari salah satu fraksi, untuk melakukan voting oleh semua Anggota DPRD Kaltim, untuk menetapkan tiga nama dengan ranking tertinggi yang akan dibawa ke Kemendagri.

"Sudah digodok dengan skemanya, karena tidak ditentukan tatibnya gimana, tadi fraksi NasDem menginginkan perkursi, jadi semua kursi boleh, maksudnya mewakili fraksi," tutupnya.

Pewartanya : Andi Desky

Editor : Nicha Ratnasari

TOYOTA LET'S GO BEYOND

— Come join us for New Avanza and New Veloz @auto2000_bontang —

LET'S TEST DRIVE!

EZ Deal
Get Your Toyota, Upgrade Your Style

DAPATKAN UNDIAN TEST DRIVE

AUTO2000 BONTANG
Jl. Bigun Karama No. 116A, Sebelah Kiri, Bontang Barat, Kota Bontang Kalimantan Timur

Scan QR CODE Test Drive Pada Aplikasi M-TOYOTA

DOWNLOAD APLIKASI M-TOYOTA

Urusan Toyota lebih mudah!

AUTO 2000
member of ASTRA

TOYOTA LET'S GO BEYOND

BOOKING THS SAJA

BTS
di Digiroom

THS Sama Lengkapnya Dengan Bengkel

DAPATKAN GRATIS 1st OLI TMO SYNETIC SETIAP SERVICE BERKALA*

Mekanik Professional | Memenuhi SOP Kesehatan Part Original | Tanpa Biaya Kunjungan | Bergaransi

Kode Promo BTSOLI

*Syarat dan ketentuan berlaku

Informasi - Call/WA :
Adi S : 0822-5435-0088

Urusan Toyota lebih mudah!

AUTO 2000
member of ASTRA

Bontang